

**BAB VIII**  
**INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS**  
**DAN KEBUTUHAN PENDANAAN**

**8.1. Landasan Prioritas Pembangunan Jangka Menengah**

Landasan dalam menyusun kerangka prioritas pembangunan di Kota Magelang tahun 2011-2015 adalah:

**A. Sasaran Pembangunan Millennium 2015 (MDGs 2015)**

Sasaran Pembangunan Millennium (Millennium Development Goals atau MDGs) adalah delapan tujuan yang diupayakan untuk dicapai pada tahun 2015 merupakan tantangan utama dalam pembangunan diseluruh dunia. Tantangan-tantangan ini sendiri diambil dari seluruh tindakan dan target yang dijabarkan dalam Deklarasi Milenium yang diadopsi oleh 189 negara dan ditandatangani oleh 147 kepala pemerintahan dan kepala negara pada saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium di New York pada bulan September 2000.

Deklarasi Millennium PBB yang ditandatangani pada tanggal 8 September 2000 menyetujui agar semua negara melaksanakan:

1. Pengentasan kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim  
Target untuk 2015: Mengurangi setengah dari penduduk dunia yang berpenghasilan kurang dari 1 dolar AS sehari dan mengalami kelaparan.
2. Pemerataan pendidikan dasar  
Target untuk 2015: Memastikan bahwa setiap anak, baik laki-laki dan perempuan mendapatkan dan menyelesaikan tahap pendidikan dasar.
3. Mendukung adanya persamaan jender dan pemberdayaan perempuan  
Target 2005 dan 2015: Mengurangi perbedaan dan diskriminasi gender dalam pendidikan dasar dan menengah terutama untuk tahun 2005 dan untuk semua tingkatan pada tahun 2015.
4. Mengurangi tingkat kematian anak  
Target untuk 2015: Mengurangi dua per tiga tingkat kematian anak-anak usia di bawah 5 tahun.
5. Meningkatkan kesehatan ibu  
Target untuk 2015: Mengurangi dua per tiga rasio kematian ibu dalam proses melahirkan
6. Perlawanan terhadap HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya

Target untuk 2015: Menghentikan dan memulai pencegahan penyebaran AIDS, malaria dan penyakit berat lainnya.

7. Menjamin daya dukung lingkungan hidup

Target 2015:

- Mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dalam kebijakan setiap negara dan program serta mengurangi hilangnya sumber daya lingkungan
- Pada tahun 2015 mendatang diharapkan mengurangi setengah dari jumlah orang yang tidak memiliki akses air minum yang sehat
- Pada tahun 2020 mendatang diharapkan dapat mencapai pengembangan yang signifikan dalam kehidupan untuk sedikitnya 100 juta orang yang tinggal di daerah kumuh

8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan

Target 2015:

- Mengembangkan lebih jauh lagi perdagangan terbuka dan sistem keuangan yang berdasarkan aturan, dapat diterka dan tidak ada diskriminasi. Termasuk komitmen terhadap pemerintahan yang baik, pembangunan dan pengurangan tingkat kemiskinan secara nasional dan internasional.
- Membantu kebutuhan-kebutuhan khusus negara-negara kurang berkembang, dan kebutuhan khusus dari negara-negara terpencil dan kepulauan-kepulauan kecil. Ini termasuk pembebasan-tarif dan kuota untuk ekspor mereka; meningkatkan pembebasan hutang untuk negara miskin yang berhutang besar; pembatalan hutang bilateral resmi; dan menambah bantuan pembangunan resmi untuk negara yang berkomitmen untuk mengurangi kemiskinan.
- Secara komprehensif mengusahakan persetujuan mengenai masalah utang negara-negara berkembang.
- Menghadapi secara komprehensif dengan negara berkembang dengan masalah hutang melalui pertimbangan nasional dan internasional untuk membuat hutang lebih dapat ditanggung dalam jangka panjang.
- Mengembangkan usaha produktif yang layak dijalankan untuk kaum muda
- Dalam kerja sama dengan pihak "pharmaceutical", menyediakan akses obat penting yang terjangkau di negara berkembang
- Dalam kerjasama dengan pihak swasta, membangun adanya penyerapan keuntungan dari teknologi-teknologi baru, terutama teknologi informasi dan komunikasi.

Setiap negara yang berkomitmen dan menandatangani perjanjian diharapkan membuat laporan MDGs. Pemerintah Indonesia melaksanakannya dibawah koordinasi Bappenas dibantu dengan Kelompok Kerja PBB dan telah menyelesaikan laporan MDGs pertamanya. Laporan Sasaran Pembangunan Milenium ini menjabarkan upaya awal pemerintah untuk menginventarisasi situasi pembangunan manusia yang terkait dengan pencapaian sasaran MDGs, mengukur, dan menganalisa kemajuan seiring dengan upaya menjadikan pencapaian-pencapaian ini menjadi kenyataan, sekaligus mengidentifikasi dan meninjau kembali kebijakan-kebijakan dan program-program pemerintah yang dibutuhkan untuk memenuhi sasaran-sasaran ini. Dengan tujuan utama mengurangi jumlah orang dengan pendapatan dibawah upah minimum regional antara tahun 1990 dan 2015. Laporan ini menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam jalur untuk mencapai tujuan tersebut. Namun, pencapaiannya lintas provinsi tidak seimbang.

Kini MDGs telah menjadi referensi penting pembangunan di Indonesia, mulai dari tahap perencanaan seperti yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) hingga pelaksanaannya. Walaupun mengalami kendala, namun pemerintah memiliki komitmen untuk mencapai sasaran-sasaran ini dan dibutuhkan kerja keras serta kerjasama dengan seluruh pihak, termasuk masyarakat madani, pihak swasta, dan lembaga donor. Pencapaian MDGs di Indonesia akan dijadikan dasar untuk perjanjian kerjasama dan implementasinya di masa depan. Hal ini termasuk kampanye untuk perjanjian tukar guling hutang untuk negara berkembang sejalan dengan Deklarasi Jakarta mengenai MDGs di daerah Asia dan Pasifik.

## **B. Prioritas Pembangunan Nasional**

Pembangunan hakikatnya adalah upaya mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, berkeadilan, berdasarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sesuai tujuan yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa hakikat pembangunan nasional adalah: mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi.

Sebagai suatu bangsa yang mengikatkan diri dalam bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, maka tujuan nasional perlu diwujudkan oleh seluruh lapisan bangsa tanpa kecuali. Pemerintah sebagai penyelenggara negara adalah penggerak (fasilitator dan dinamisator) perwujudan tujuan nasional itu. Dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintah bertindak mewakili kepentingan seluruh lapisan bangsa.

Pembangunan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat terdiri dari: tingkat mikro individu atau pribadi rakyat; tingkat agregat-nasional dimulai di tingkat kelompok masyarakat, desa-kelurahan, kecamatan, kabupaten-kota, provinsi sampai nasional; dan tingkat global-internasional pembangunan antarnegara bangsa dengan mendasarkan diri kepada **Pancasila dan UUD 1945**.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, visi Pembangunan Nasional adalah: "**Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil Dan Makmur**" yang akan dicapai dalam empat tahapan skala prioritas utama dan strategi RPJMN di mana masing-masing tahapan merupakan kesinambungan dari skala prioritas dan strategi pembangunan pada periode-periode sebelumnya. Secara ringkas keempat tahapan itu adalah sebagai berikut:

1. RPJM ke-1 (2005–2009) diarahkan untuk menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat.
2. **RPJM ke-2 (2010–2014)** ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan iptek serta penguatan daya saing perekonomian.
3. RPJM ke-3 (2015–2019) ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan iptek yang terus meningkat.
4. RPJM ke-4 (2020–2025) ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-1, RPJM ke-2 (2010–2014) yang telah dituangkan ke dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010–2014 memuat kerangka Visi Indonesia 2014, yaitu: "**Terwujudnya Indonesia Yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan**" dengan kandungan misi-misi sebagai berikut:

Misi 1: Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera

Misi 2: Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi

Misi 3: Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang

Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional 2010-2014, ditetapkan lima agenda utama pembangunan nasional tahun 2010-2014, yaitu:

Agenda I : Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

Agenda II : Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan

Agenda III : Penegakan Pilar Demokrasi

Agenda IV : Penegakkan Hukum dan Pemberantasan Korupsi

Agenda V : Pembangunan Yang Inklusif dan Berkeadilan

Sasaran Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan. Sesuai dengan persoalan utama yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, pemerintah bertekad untuk melanjutkan proses percepatan pembangunan ekonomi selama lima tahun ke depan. Dengan pulihnya perekonomian global dalam 1-2 tahun mendatang, capaian tertinggi yang pernah dicapai oleh laju pertumbuhan perekonomian Indonesia sebelum krisis sekitar 7 persen sudah dapat dipenuhi sebelum tahun terakhir masa 2010-2014.

Percepatan laju pertumbuhan ekonomi ini diharapkan mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka hingga di sekitar 5-6 persen pada akhir tahun 2014, dan kesempatan kerja yang tercipta antara 9,6 juta-10,7 juta pekerja selama periode 2010-2014. Kombinasi antara percepatan pertumbuhan ekonomi dan berbagai kebijakan intervensi pemerintah yang terarah diharapkan dapat mempercepat penurunan tingkat kemiskinan menjadi sekitar 8-10 persen pada akhir 2014.

Untuk memenuhi sasaran percepatan pertumbuhan ekonomi tersebut, pemerintah akan terus melanjutkan kebijakan makroekonomi yang terukur dan berhati-hati, sehingga inflasi dapat dikendalikan pada tingkat rendah yang sebanding dengan negara-negara setaraf dengan Indonesia yaitu sekitar 4-6 persen per tahun. Inflasi yang terkendali memungkinkan nilai tukar dan suku bunga yang kompetitif sehingga mendorong sektor riil bergerak dan berkembang dengan sehat.

Dalam bidang pendidikan, sasaran pembangunan ditujukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatnya mutu pendidikan, yang antara lain ditandai oleh menurunnya jumlah penduduk buta huruf; meningkatnya secara nyata persentase penduduk yang dapat menyelesaikan program wajib belajar 9 tahun dan pendidikan lanjutan dan berkembangnya pendidikan kejuruan yang ditandai oleh meningkatnya jumlah tenaga terampil.

Sementara itu, di bidang kesehatan peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, antara lain, ditandai oleh meningkatnya angka harapan hidup, menurunnya tingkat kematian bayi, dan kematian ibu melahirkan.

Dalam bidang pangan, terciptanya kemandirian dalam bidang pangan pada akhir tahun 2014 ditandai dengan meningkatnya ketahanan pangan rakyat, berupa perbaikan status gizi ibu dan anak pada golongan masyarakat yang rawan pangan,

membaijnyabkses rumah tangga golongan miskin terhadap pangan, terpelihara dan terus meningkatnya kemampuan swasembada beras dan komoditas pangan utama lainnya, bmenjaga harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat kelompok pendapatan menengah bawah, menjaga nilai tukar petani agar dapat menikmati kemakmuran, dan bmeningkatkan daya tawar komoditas Indonesia dan keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dari sektor pertanian Indonesia di kawasan regional Asia dan Global.

Bidang energi membangun ketahanan energi dengan mencapai diversifikasi energi yang menjamin keberlangsungan dan jumlah pasokan energi di seluruh Indonesia dan untuk seluruh penduduk Indonesia dengan tingkat pendapatan yang berbeda-beda, meningkatkan penggunaan energi terbarukan (*renewable energy*) dan berpartisipasi aktif dan memanfaatkan berkembangnya perdagangan karbon secara global, meningkatkan efisiensi konsumsi dan penghematan energi baik di lingkungan rumah tangga maupun industri dan sektor transportasi, dan memproduksi energi yang bersih dan ekonomis.

Dalam bidang lingkungan hidup, sasaran yang hendak dicapai adalah perbaikan mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan, penahanan laju kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan; peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Selain itu terus dilakukan program reboisasi, penghutanan kembali (*reforestasi*) dan program pengurangan emisi karbon. Dalam rangka mengatasi dampak pemanasan global untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, Indonesia, pada tahun 2009, dalam pertemuan G 20 di Pittsburgh dan Konvensi Internasional tentang Perubahan Iklim di Copenhagen telah berinisiatif memberikan komitmen mitigasi dampak perubahan iklim berupa penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) pada tahun 2020 sebesar 26% dari kondisi tanpa rencana aksi (*business as usual – BAU*) dengan usaha sendiri serta penurunan sebesar 41% dengan dukungan internasional. Upaya penurunan emisi GRK tersebut terutama difokuskan pada kegiatan-kegiatan kehutanan, lahan gambut, limbah dan energi yang didukung oleh langkah-langkah kebijakan di berbagai sektor dan kebijakan fiskal.

Bidang infrastruktur meneruskan pembangunan dan pasokan infrastruktur yang ditunjukkan oleh meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai prasarana penunjang pembangunan seperti jalan raya, jalan kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, listrik, irigasi, air bersih dan sanitasi serta pos dan telekomunikasi.

Dalam bidang Usaha Kecil dan Menengah langkah-langkah yang dilakukan adalah, meningkatkan dan memajukan usaha kecil menengah dengan menambah akses terhadap modal termasuk perluasan Kredit Usaha Rakyat (KUR), meningkatkan bantuan teknis dalam aspek pengembangan produk dan pemasaran,

melaksanakan kebijakan pemihakan untuk memberikan ruang usaha bagi pengusaha kecil dan menengah, serta menjaga fungsi, keberadaan serta efisiensi pasar tradisional.

Sasaran Perkuatan Pembangunan Demokrasi. Sasaran penegakan pilar demokrasi adalah membangun dan semakin memantapkan sistem demokrasi di Indonesia yang dapat menghasilkan pemerintahan dan lembaga legislatif yang kredibel, bermutu, efektif, dan mampu menyelenggarakan amanah dan tugas serta tanggung jawabnya secara baik, seimbang dengan peningkatan kepatuhan terhadap pranata hukum. Dengan demikian, fungsi checks and balances dapat dilakukan secara santun, beretika, dan efektif sehingga penyelenggaraan negara tidak terhambat oleh mekanisme dan sistem demokrasi, namun sebaliknya akan makin meningkat kualitas hasil dan akuntabilitasnya. Sasaran di bidang ini juga adalah untuk menjamin setiap lima tahun terselenggaranya proses pemilu yang memenuhi azas-azas demokrasi yang baik, yaitu jujur, adil, dan menjamin seluruh warga negara pemilih dapat melaksanakan hak memilihnya secara bebas dan bertanggung jawab.

Sasaran Penegakan Hukum. Penegakan Hukum merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dan sangat penting dalam menjaga sistem demokrasi yang berkualitas dan juga mendukung iklim berusaha yang baik agar kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan pasti, aman dan efisien, dalam rangka mencapai kesejahteraan rakyat. Sasaran reformasi penegakan hukum adalah tercapainya suasana dan kepastian keadilan melalui penegakan hukum (rule of law) dan terjaganya ketertiban umum. Sasaran tersebut tercermin dari persepsi masyarakat pencari keadilan untuk merasakan kenyamanan, kepastian, keadilan dan keamanan dalam berinteraksi dan mendapat pelayanan dari para penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan). Dengan demikian reformasi kepolisian dan kejaksaan, dan lembaga peradilan harus dilakukan untuk dapat menghasilkan sasaran berupa muncul dan tumbuhnya kepercayaan dan penghormatan publik kepada aparat dan lembaga penegak hukum karena mereka dipercaya akan selalu melindungi masyarakat berdasarkan azas keadilan dan kepatuhan pada aturan dan hukum tanpa pembedaan dan diskriminasi.

Sasaran Pembangunan SDM. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) yang ditandai dengan: (a) Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), (b) Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) didukung dengan menurunnya Net Reproduction Rate (NRR) = 1,0, dan (c) Makin kuatnya jati diri dan karakter bangsa.

Sinergi Pusat-daerah dan antardaerah dilakukan dalam seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi yang mencakup: (1)

Sinergi dalam perencanaan kebijakan, (2) Sinergi dalam kerangka regulasi, (3) Sinergi dalam kerangka anggaran, (4) Sinergi dalam kerangka kelembagaan, dan (5) Sinergi dalam kerangka pengembangan wilayah.

Selain berbagai bidang yang telah disebutkan di atas, pemerintah tetap mengembangkan sektor-sektor pembangunan lainnya secara konsisten, terkoordinasi dan terintegrasi. Dengan demikian, pada akhir RPJMN 2010 -2014 Indonesia berhasil mencapai berbagai sasaran pembangunan nasional untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan.

Untuk melaksanakan agenda dan sasaran pembangunan tersebut di atas telah ditetapkan sebelas prioritas pembangunan nasional 2010-2014 yang meliputi:

**Prioritas 1:** Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa, dan transparan. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditopang oleh efisiensi struktur pemerintah di pusat dan di daerah, kapasitas pegawai pemerintah yang memadai, dan data kependudukan yang baik.

**Prioritas 2:** Pendidikan

Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat. Pembangunan bidang pendidikan diarahkan demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang didukung keselarasan antara ketersediaan tenaga terdidik dengan kemampuan: 1) menciptakan lapangan kerja atau kewirausahaan dan 2) menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja.

**Prioritas 3:** Kesehatan

Penitikberatan pembangunan bidang kesehatan melalui pendekatan preventif, tidak hanya kuratif, melalui peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan di antaranya dengan perluasan penyediaan air bersih, pengurangan wilayah kumuh sehingga secara keseluruhan dapat meningkatkan angka harapan hidup dari 70,7 tahun pada 2009 menjadi 72,0 tahun pada 2014, dan pencapaian keseluruhan sasaran Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015.

**Prioritas 4:** Penanggulangan Kemiskinan

Penurunan tingkat kemiskinan absolut dari 14,1% pada 2009 menjadi 8-10% pada 2014 dan perbaikan distribusi pendapatan dengan perlindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah.

**Prioritas 5:** Ketahanan Pangan

Peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian,

peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Peningkatan pertumbuhan PDB sektor pertanian sebesar 3,7% per tahun dan Indeks Nilai Tukar Petani sebesar 115-120 pada 2014.

**Prioritas 6:** Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur nasional yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat umum di seluruh bagian negara kepulauan Republik Indonesia dengan mendorong partisipasi masyarakat.

**Prioritas 7:** Iklim Investasi dan Iklim Usaha

Peningkatan investasi melalui perbaikan kepastian hukum, penyederhanaan prosedur, perbaikan sistem informasi, dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

**Prioritas 8:** Energi

Pencapaian ketahanan energi nasional yang menjamin kelangsungan pertumbuhan nasional melalui restrukturisasi kelembagaan dan optimalisasi pemanfaatan energi alternatif seluas-luasnya.

**Prioritas 9:** Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

Konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang keberlanjutan, disertai penguasaan dan pengelolaan risiko bencana untuk mengantisipasi perubahan iklim.

**Prioritas 10:** Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik

Program aksi untuk daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik ditujukan untuk pengutamaan dan penjaminan pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar serta keberlangsungan kehidupan damai di wilayah pascakonflik.

**Prioritas 11:** Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi

Pengembangan dan perlindungan kebhinekaan budaya, karya seni, dan ilmu serta apresiasinya, untuk memperkaya khazanah artistik dan intelektual bagi tumbuhmapannya jati diri dan kemampuan adaptif kompetitif bangsa yang disertai pengembangan inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang dilandasi oleh keunggulan Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan.

Pada dasarnya sebelas Prioritas Nasional di atas merupakan upaya untuk: *Pertama*, Percepatan Pembangunan Infrastruktur Fisik (meliputi Prioritas 5 Ketahanan Pangan, Prioritas 6 Infrastruktur, Prioritas 8 Energi, serta Prioritas 10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik). *Kedua*, Perbaikan Infrastruktur Lunak (Prioritas 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola dan Prioritas 7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha). *Ketiga*, Penguatan Infrastruktur Sosial (Prioritas 2 Pendidikan, Prioritas 3 Kesehatan, Prioritas 4 Penanggulangan Kemiskinan dan

Prioritas 9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana). *Keempat*, Pembangunan Kreativitas (Prioritas 11 Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi).

**Prioritas Lainnya.**

Di samping sebelas prioritas nasional tersebut di atas, upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Nasional juga melalui pencapaian prioritas nasional lainnya di bidang politik, hukum, dan keamanan, di bidang perekonomian, dan di bidang kesejahteraan rakyat.

Di bidang politik, hukum, dan keamanan mencakup: (a) pelaksanaan koordinasi terhadap mekanisme prosedur penanganan terorisme; (b) pelaksanaan program deradikalisasi untuk menangkal terorisme; (c) peningkatan peran Republik Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia; (d) peningkatan pelayanan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri; (e) penguatan dan pemantapan hubungan kelembagaan pencegahan dan pemberantasan korupsi; (f) pelaksanaan perlindungan saksi dan pelapor; (g) pengembalian aset (asset recovery); (h) peningkatan kepastian hukum; (i) penguatan perlindungan HAM; dan (i) pemberdayaan industri strategis pertahanan.

Di bidang perekonomian mencakup: (a) pelaksanaan pengembangan industri sesuai dengan Peraturan Presiden No.28/2008 tentang Kebijakan Industri Nasional; (b) peningkatan peran dan kemampuan Republik Indonesia dalam diplomasi perdagangan internasional; (c) peningkatan pelayanan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) selama proses penyiapan, pemberangkatan, dan kepulangan; serta (d) peningkatan upaya pelayanan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.

Di bidang kesejahteraan rakyat mencakup: (a) pelaksanaan ibadah haji yang tertib dan lancar paling lambat pada 2010; (b) peningkatan kerukunan umat beragama melalui pembentukan dan peningkatan efektivitas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB); (c) peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara sebesar 20% secara bertahap dalam 5 tahun; (d) promosi 10 tujuan pariwisata Indonesia melalui saluran pemasaran dan pengiklanan yang kreatif dan efektif; (e) perbaikan dan peningkatan kualitas jaringan prasarana dan sarana pendukung pariwisata; (f) peningkatan kapasitas pemerintah dan pemangku kepentingan pariwisata lokal untuk mencapai tingkat mutu pelayanan dan hospitality management yang kompetitif di kawasan Asia; (g) perumusan kebijakan dan pedoman bagi penerapan pengarusutamaan (mainstreaming) Gender dan Anak (PUG & A) oleh Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian lainnya; (h) pencapaian posisi papan atas pada South East Asia (SEA) Games pada tahun 2011, peningkatan perolehan medali di Asian Games tahun 2010 dan Olimpiade tahun

2012; (i) peningkatan character building melalui gerakan, revitalisasi dan konsolidasi gerakan kepemudaan; serta (j) revitalisasi gerakan pramuka.

Dalam rangka mengakselerasikan pencapaian prioritas-prioritas pembangunan nasional tersebut di atas, telah dikeluarkan **Instruksi Presiden No 1 Tahun 2010** tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010. Disamping itu juga telah dikeluarkan **Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2010** tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan, yang bertujuan untuk lebih memfokuskan pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan, dan untuk kesinambungan serta penajaman prioritas pembangunan nasional tahun 2010 yang meliputi:

- 1) Program Pro Rakyat
- 2) Program Keadilan Untuk Semua (Justice For All)
- 3) Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium (Millennium Development Goals / MDGs)

Untuk program pro rakyat, memfokuskan pada: (a) Program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga; (b) Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat; dan (c) Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil.

Untuk program keadilan untuk semua, memfokuskan pada: (a) Program keadilan bagi anak; (b) Program keadilan bagi perempuan; (c) Program keadilan di bidang ketenagakerjaan; (d) Program keadilan di bidang bantuan hukum; (e) Program keadilan di bidang reformasi hukum dan peradilan; dan (f) Program keadilan bagi kelompok miskin dan terpinggirkan;

Untuk program pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium, memfokuskan pada: (a) Program pemberantasan kemiskinan dan kelaparan; (b) Program pencapaian pendidikan dasar untuk semua; (c) Program pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; (d) Program penurunan angka kematian anak; (e) Program kesehatan ibu; (f) Program pengendalian HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya; (g) Program penjaminan kelestarian lingkungan hidup; dan (h) Program pendukung percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium.

### **C. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah**

RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 (Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 4 Tahun 2009) merupakan penjabaran dari RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008). Prioritas pembangunan untuk tahap pertama dan tahap kedua RPJPD 2005 - 2025, merupakan acuan bagi pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur

periode 2008 – 2013 dalam menyusun visi, misi, dan program pembangunan daerah selama periode kepemimpinannya. Seperti diketahui bahwa periode kepemimpinan Pasangan Gubernur-Wakil Gubernur 2008 - 2013 termasuk dalam dua tahapan pembangunan dalam RPJPD yaitu tahap pertama dan tahap kedua.

Tahap pertama pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Tengah (tahun 2005-2009) berorientasi pada kelanjutan pencapaian target pembangunan dalam Renstra Jawa Tengah tahun 2003 - 2008 yang diarahkan pada pemerataan akses pelayanan dasar, peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi rakyat, peningkatan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan serta pengelolaan sumber daya alam. Sedangkan tahapan kedua pembangunan Jawa Tengah (2010 - 2014) diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan dasar, peningkatan daya saing ekonomi rakyat, peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan berkualitas serta pengelolaan sumber daya alam.

Dari rumusan prioritas pembangunan yang diamanatkan oleh RPJP 2005-2025, untuk periode pembangunan 2008-2013, telah dipilih pendekatan implementasi (implementation approach) pengembangan kawasan dan pemberdayaan masyarakat perdesaan melalui rumusan motto ***Bali Ndeso Mbangun Deso***. Rumusan motto tersebut kemudian diejawantahkan dalam visi Provinsi Jawa Tengah lima tahun mendatang (2008 - 2013) yaitu: "***Terwujudnya Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera***". Peningkatan kesejahteraan adalah kondisi kemakmuran suatu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (materiil) maupun sosial (spiritual), dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi lahir batin secara adil dan merata yang ditopang oleh kondisi aman, pemerintahan yang bersih dan efektif, dengan masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

Dalam upaya untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional serta sikap responsif aparatur sebagai pelayan masyarakat
2. Pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis agrobisnis, pertanian, UMKM, dan industri padat karya.
3. Memantapkan kondisi sosial budaya agraris yang berbasiskan kearifan lokal.
4. Pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi secara berkelanjutan.
5. Peningkatan perwujudan pembangunan fisik dan infrastruktur.
6. Mewujudkan kondisi aman dan rasa aman dalam kehidupan masyarakat yang berkeadilan dan terjamin kepastian hukum.

Untuk mewujudkan misi tersebut di atas, maka tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Jawa Tengah di segala bidang dengan didasari keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sasarannya adalah :
  - a. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat dan kemudahan akses dalam
  - b. menempuh pendidikan tanpa diskriminasi usia kelompok dan jenis kelamin;
  - c. Meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni di kalangan
  - d. masyarakat Jawa Tengah, melalui penelitian di bidang ilmu pengetahuan,
  - e. teknologi, serta eksplorasi di bidang kesenian;
  - f. Meningkatnya usia harapan hidup masyarakat Jawa Tengah;
  - g. Meningkatnya prestasi olah raga di Jawa Tengah
  - h. Meningkatnya sarana peribadatan dan pendidikan agama.
  - i. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Gender dan
  - j. Indeks Pemberdayaan Gender;
  - k. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
  - l. Meningkatnya Keluarga Kecil Berkualitas dan Sejahtera.
2. Mewujudkan masyarakat yang berkemampuan (*empowered*), berdayasaing (*competitive*) yang mengarah kepada kemandirian, melalui peran aktif pemerintah, swasta dan masyarakat. Sasarannya adalah :
  - a. Meningkatnya ketrampilan masyarakat melalui pelatihan;
  - b. Berkembangnya Balai Latihan Kerja untuk menyiapkan tenaga kerja yang siap pakai;
  - c. Menguatnya kelembagaan masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat;
  - d. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
3. Memanfaatkan secara optimal sumberdaya alam maupun buatan sesuai dengan RTRW Provinsi Jawa Tengah, hasil penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna yang melibatkan kalangan perguruan tinggi untuk mendorong terwujudnya kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Sasarannya adalah :
  - a. Terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam secara optimal, tanpa mengganggu
  - b. keseimbangan dan kelestarian alam itu sendiri;
  - c. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan
  - d. pemanfaatan sumber daya alam secara lestari;
  - e. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian alam;

- f. Berkurangnya resiko bencana.
4. Memanfaatkan potensi ekonomi lokal melalui kerjasama lokal, regional dan antar wilayah dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah provinsi guna meningkatkan daya tarik investasi. Sasarannya adalah :
    - a. Terbentuknya jejaring kerjasama antar daerah dan antar lembaga yang semakin mantap dan sinergis dalam bidang-bidang yang memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengembangkan perekonomian daerah dan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
    - b. Terpenuhinya sarana dan prasarana pelaksanaan kerjasama antar lembaga, daerah dan wilayah.
    - c. Meningkatnya ketahanan pangan melalui sistem kewaspadaan pangan dan gizi, lumbung pangan dan desa mandiri pangan;
    - d. Meningkatnya produktivitas pertanian melalui pertanian terpadu, benih bermutu, pengendalian hama terpadu, optimalisasi pupuk organik dan penerapan teknologi tepat guna.
    - e. Meningkatnya kualitas manajemen pariwisata, yang mendukung pengembangan ekonomi lokal.
    - f. Meningkatnya kualitas forum pengembangan ekonomi daerah di kabupaten atau kota se Jawa Tengah.
    - g. Berkembangnya potensi lokal melalui pendekatan klaster dan kawasan, khususnya pertanian, industri dan pariwisata.
  5. Membangun dan mengembangkan jaringan bisnis ekonomi lokal melalui Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang diarahkan pada pengelolaan usaha oleh pelaku bisnis secara mandiri. Sasarannya adalah :
    - a. Terwujudnya masyarakat yang pro aktif dan tanggap dalam mengantisipasi peluang yang tersedia;
    - b. Tersusunnya peraturan/regulasi yang mendukung pemberdayaan masyarakat;
    - c. Berkembangnya UMKM dengan mempermudah akses permodalan, mekanisme kinerja kelembagaan UMKM, akses pasar dan jaminan ketersediaan transportasi, serta sistem perlindungan yang memadai;
    - d. Berkembangnya daerah penyangga bahan baku bagi UMKM, melalui pemanfaatan teknologi tepat guna;
    - e. Berkembangnya pasar regional, dan internasional serta menjaga kesinambungan pasar yang sudah ada;
  6. Meningkatkan kemampuan, kompetensi dan profesionalisme aparatur Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya yang diarahkan kepada pelayanan serta peningkatan kemampuan masyarakat. Sasarannya adalah:

- a. Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah melalui pendidikan dan pelatihan;
  - b. Terwujudnya sistem kepegawaian yang mantap, teruji dan menjamin penjenjangan karier pegawai secara sehat.
7. Meningkatkan demokratisasi dan penegakan HAM serta pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme dalam rangka memberikan kepercayaan kepada para investor serta dapat membangkitkan gairah masyarakat dalam berkarya membangun bangsa melalui :
- a. Penyusunan produk-produk hukum daerah;
  - b. Sosialisasi, penerapan dan penegakan produk hukum secara konsisten dan konsekuen.
8. Memantapkan administrasi pemerintahan dengan penerapan *Information Communication and Technology* (ICT) melalui *electronic government* di lingkungan pemerintahan daerah di Provinsi Jawa Tengah dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kebebasan akses informasi bagi masyarakat. Sasarannya adalah :
- a. Semakin mantapnya sistem administrasi pemerintahan;
  - b. Semakin mantapnya sistem pelayanan kepada masyarakat oleh pemerintah;
  - c. Terbentuknya kelembagaan pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan lokal;
  - d. Berkembangnya penggunaan sistem ICT dalam tata laksana pemerintahan di Provinsi Jawa Tengah.
  - e. Meningkatnya kemudahan pelayanan perijinan di seluruh tingkatan (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota);
  - f. Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aparatur pemerintah yang membuka peluang terhadap partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan;

Dari uraian mengenai visi, misi dan tujuan pembangunan yang ingin dicapai oleh Propinsi Jawa Tengah selama periode 2008 – 2013 ditetapkan target agregat untuk beberapa indikator utama pembangunan dan disusun pentahapan sebagai milestone, atau sasaran-sasaran antara yang ingin dicapai.

Target Agregat ditetapkan terhadap beberapa indikator utama meliputi : IPM (Indeks Pembangunan Manusia), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Indeks Gini, Indeks Williamson, Nilai Tukar Petani (NTP), Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi, Persentase Penduduk Miskin dan Persentase Penganggur.

IPM di tahun 2013 ditarget sebesar 74,3. Penetapan target ini didasarkan pada data 5 tahun terakhir dimana angka IPM selalu mengalami kenaikan. Target capaian IPM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 -2013 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel VIII.1**

**Target Capaian IPM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2013**

No	Tahun	UHH (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Angka Melek Huruf (%)	Pengeluaran Riil/Kapita (Rp. 000)	IPM
1	2009	72,6	6,9	95,6	624,2	72,6
2	2010	72,9	6,9	96,1	624,8	72,9
3	2011	73,2	7,0	96,6	625,3	73,7
4	2012	73,5	7,0	97,0	625,8	73,9
5	2013	73,8	7,0	97,3	626,2	74,3

Untuk tolok ukur IPG dan IDG, target IPG tahun 2013 ditetapkan sebesar 65,9 sementara untuk IDG sebesar 61,8. Target capaian IPG dan IDG Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2013 sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini:

**Tabel VIII.2**

**Target Capaian IPG dan IDG Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2013**

No	Tahun	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
1	2009	64,5	60,0
2	2010	64,9	60,3
3	2011	65,3	60,6
4	2012	65,6	60,9
5	2013	65,9	61,8

Kondisi baik yang telah dicapai pada 5 tahun terakhir tentang kesenjangan antar kelompok pendapatan (yang ditunjukkan oleh Indeks Gini dibawah 0,30) harus tetap dipertahankan. Oleh karena itu pada akhir tahun perencanaan, Indeks Gini harus lebih baik dibandingkan dengan tahun 2003, untuk itu ditetapkan sebesar 0,23. Sementara untuk menurunkan Indeks Williamson ke arah kategori sedang maupun baik relatif sulit karena secara alamiah memang terjadi disparitas yang cukup tinggi antara wilayah Kota (dalam hal ini Kota Semarang dan Kota Surakarta) dengan wilayah Kabupaten yang termasuk kategori miskin (misalnya Brebes dan Wonosobo). Meskipun demikian penurunan Indeks Williamson ini harus terus diupayakan melalui peningkatan PDRB wilayah kabupaten yang tergolong tertinggal. Untuk itu pada akhir tahun perencanaan ditetapkan besarnya Indeks Williamson sebesar 0,69.

**Tabel VIII.3**  
**Target Capaian Indeks Gini dan Indeks Williamson**  
**Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2013**

No	Tahun	Indeks Gini (IG)	Indeks Williamson (IW)
1	2009	0,25	0,70
2	2010	0,25	0,72
3	2011	0,24	0,71
4	2012	0,23	0,70
5	2013	0,23	0,69

Meskipun pada saat RPJMD ini disusun sedang terjadi krisis ekonomi di Amerika Serikat dan dampaknya mulai dirasakan oleh seluruh belahan dunia, namun Indonesia tetap optimis bahwa krisis tersebut tidak menyebabkan terpuruknya ekonomi. Di Jawa Tengah dampak krisis ini telah pula dirasakan berupa berkurangnya volume ekspor produksi Jawa Tengah yang memiliki pasar di AS seperti produk furnitur, TPT (tekstil dan produk tekstil) dan produk kerajinan (handicraft). Inflasi diperkirakan tetap cukup tinggi, hal ini antara lain disebabkan oleh menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Target pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel VIII.4**  
**Target Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Inflasi**  
**Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2013**

No	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Tingkat Inflasi (%)
1	2009	6,05 %	8,21 %
2	2010	6,22 %	8,32 %
3	2011	6,38 %	8,42 %
4	2012	6,52 %	8,51 %
5	2013	6,66 %	8,59 %

Nilai tukar petani (NTP) sesuatu yang sangat strategis untuk dipertahankan diatas angka 100 dan diharapkan dapat selalu ditingkatkan setiap tahun agar petani dapat melakukan saving, untuk selanjutnya dapat dipergunakan dalam investasi pada faktor produksi. Nilai NTP pada tahun 2009 ditargetkan sebesar 104,81 % dan sampai dengan tahun 2013 diharapkan selalu naik hingga menjadi 108,67 %.

**Tabel VIII.5**  
**Target Nilai Tukar Petani (NTP)**  
**Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2013**

No	Tahun	Nilai Tukar Petani (NTP)
1	2009	104,81 %
2	2010	105,94 %
3	2011	106,94 %
4	2012	107,84 %
5	2013	108,67 %

Pengurangan jumlah penduduk miskin dan penganggur merupakan salah satu tujuan yang harus dicapai oleh Pemerintah Propinsi Jawa Tengah 2008 - 2013. Persentase penduduk miskin ditargetkan terus menerus menurun dari 20,95 % di tahun 2009 menjadi 13,27 % pada tahun 2013. Target ini disusun dengan memperhatikan amanat kesepakatan MDG's. Sedangkan persentase penganggur ditargetkan turun dari 7,75 % di tahun 2009 menjadi 7,34 % pada tahun 2013.

**Tabel VIII.6**

**Persentase Penduduk Miskin dan Pengangguran Provinsi Jawa Tengah**

No	Tahun	Persentase Penduduk Miskin (%)	Persentase Penganggur (%)
1	2009	20,95	7,75
2	2010	18,59	7,63
3	2011	15,49	7,52
4	2012	14,34	7,43
5	2013	13,27	7,34

Dalam upaya untuk mencapai target-target di atas, program-program yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan (2008-2013) tercakup dalam empat besar kelompok program yang meliputi:

- 1) Kewenangan urusan wajib;
- 2) Kewenangan urusan pilihan;
- 3) Tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan; dan
- 4) Tugas umum pemerintahan.

Kelompok program kewenangan urusan wajib, meliputi 26 kewenangan urusan, terdiri dari: Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum; Perumahan Rakyat; Penataan Ruang; Perencanaan Pembangunan; Perhubungan; Lingkungan Hidup; Pertanahan; Kependudukan dan Catatan Sipil; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; Social; Ketenagakerjaan; Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; Penanaman Modal; Kebudayaan; Kepemudaan dan Olah raga; Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri; Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian; Ketahanan Pangan; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Statistik; Kearsipan; Komunikasi dan Informatika; dan Perpustakaan.

Program-program kewenangan urusan pilihan, dikelompokkan dalam 8 kewenangan urusan, sebagai berikut: Pertanian; Kehutanan; Energi dan Sumber Daya Mineral; Pariwisata; Kelautan dan Perikanan; Perdagangan; Industri; dan Transmigrasi.

Pelaksanaan Tugas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Pelaksanaan dekonsentrasi bertujuan untuk: (1) Memelihara keutuhan dan integrasi nasional; (2)

Melaksanakan kebijakan nasional dalam mengurangi kesenjangan antar daerah; (3) mewujudkan keserasian hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah; (4) Mengidentifikasi potensi dan terpeliharanya keanekaragaman sosial budaya daerah; (5) Mencapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik. Sementara penyelenggaraan tugas pembantuan adalah cermin dari sistem dan prosedur penugasan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, untuk menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dan pembangunan oleh pemerintah pusat dan disertai dengan kewajiban pendanaannya, dimana pelaksana wajib melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraannya.

Program-program pembangunan yang dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan, meliputi: (1) Program peningkatan Kerjasama Antar Daerah (KAD); (2) Program peningkatan pembangunan kawasan wilayah perbatasan; (3) Program pencegahan dan penanggulangan bencana; (4) Program peningkatan pengelolaan kawasan khusus; dan (5) Program peningkatan ketertiban umum dan ketenteraman dalam masyarakat.

### **C. Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Kota Magelang**

Visi Kota Magelang Tahun 2005-2025 adalah "***Magelang Sebagai Kota Jasa Yang Berbudaya, Maju Dan Berdaya Saing Dalam Masyarakat Madani***", sedangkan misinya meliputi:

1. Mewujudkan Kota Magelang sebagai pusat pelayanan jasa yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan fasilitas yang memadai.
2. Mewujudkan masyarakat Kota Magelang yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab.
3. Meningkatkan daya saing daerah melalui pengelolaan pembangunan Kota Magelang yang efisien, efektif, profesional dan berwawasan lingkungan serta mengembangkan potensi daerah secara kreatif dan inovatif didukung oleh penguasaan iptek dan sumber daya manusia yang berkualitas.
4. Mengembangkan perekonomian Kota Magelang yang bertumpu pada penguatan ekonomi kerakyatan, penciptaan iklim usaha yang kondusif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang ditandai dengan penurunan angka kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat.
5. Mewujudkan *good governance* dan *clean goverment* dengan melibatkan dunia usaha, masyarakat madani (*civil society*), dan media massa untuk menuju

kehidupan masyarakat Kota Magelang yang damai, demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kebenaran.

Sebagai tolok ukur tercapainya kota Magelang sebagai kota jasa yang berbudaya, maju dan berdaya saing menuju masyarakat madani, pembangunan daerah dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut :

1. Terwujudnya Kota Magelang sebagai pusat pelayanan jasa yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan fasilitas yang memadai, ditandai oleh hal-hal berikut :
  - a. Terwujudnya Kota Magelang sebagai pusat pelayanan jasa untuk wilayah Jawa Tengah Bagian Tengah.
  - b. Terpenuhinya kualitas sumber daya manusia untuk kebutuhan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan di kota Magelang.
  - c. Terlengkapinya sarana dan prasarana fisik sebagai pendukung penyelenggaraan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan sebagai fasilitas pendukung kota jasa.
2. Terwujudnya masyarakat Kota Magelang yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab, ditandai oleh hal-hal berikut :
  - a. Terwujudnya karakter masyarakat yang berakhlak mulia dan bermoral yang berdasarkan falsafah Pancasila. Dicitrakan dengan watak, perilaku masyarakat yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi iptek dan sumber daya manusia yang berkualitas.
  - b. Perilaku masyarakat yang berbudaya, ditandai dengan meningkatnya peradaban, harkat, martabat, menguatnya jati diri, kepribadian, menguatnya ketahanan dan modal sosial masyarakat.
3. Terwujudnya daya saing daerah melalui pengelolaan pembangunan Kota Magelang yang efisien, efektif, profesional, berwawasan lingkungan, mengembangkan potensi daerah secara kreatif, inovatif didukung oleh penguasaan iptek dan sumber daya manusia yang berkualitas, ditandai oleh hal-hal berikut:
  - a. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif, didukung oleh peran sektor jasa dengan kualitas pelayanan yang lebih bermutu dan berdaya saing.
  - b. Tingkat pembangunan yang semakin merata keseluruh wilayah diwujudkan dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
  - c. Terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat, didukung oleh sistem

- pembiayaan perumahan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien, dan efektif untuk mewujudkan hunian kota tanpa permukiman kumuh.
- d. Terwujudnya lingkungan perkotaan yang sesuai dengan kehidupan layak dan berkelanjutan, serta mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat dalam mendukung kualitas kehidupan sosial, ekonomi secara serasi, seimbang dan lestari.
  - e. Tersusunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang memadai dan terintegrasi dengan wilayah sekitar, serta terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern guna terciptanya masyarakat informasi.
4. Terwujudnya perekonomian Kota Magelang yang bertumpu pada penguatan ekonomi kerakyatan, penciptaan iklim usaha yang kondusif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan ditandai penurunan angka kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat, yang ditandai dengan:
- a. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai 5 (lima) besar tingkat kesejahteraan di wilayah Jawa Tengah.
  - b. Tercapainya keberdayaan masyarakat dengan terfasilitasinya kebutuhan dasar, menguatnya etos kerja dan produktivitas, serta adanya jaminan perlindungan sosial.
  - c. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat diukur dari meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sedangkan kemajuan peran perempuan diukur dengan peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) atau Angka GDI (*Gender-related Development Index*) yang mengukur kualitas hidup perempuan dengan meramu komponen pendidikan, kesehatan dan ekonomi, serta peningkatan Angka GEM (*Gender Empowerment Measurement*) yang menitikberatkan pada partisipasi perempuan di bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan.
5. Terwujudnya *good governance* dan *clean government* dengan melibatkan dunia usaha, masyarakat madani (*civil society*), dan media massa sehingga kehidupan masyarakat Kota Magelang agamis, damai, demokratis, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kebenaran, ditandai dengan hal-hal berikut :
- a. Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab, serta profesional yang mampu mendukung pembangunan kota Magelang.

- b. Terciptanya supremasi hukum dan penegakan hak azasi manusia yang bersumber pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 tanpa memandang kedudukan, pangkat dan jabatan seseorang.
- c. Terwujudnya konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik yang dapat diukur dengan adanya penyelenggaraan pemerintah yang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, birokrat yang profesional dan netral, masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang mandiri.
- d. Terwujudnya peningkatan peran dunia usaha dalam ikut serta menggerakkan roda pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat melalui tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*).
- e. Tercapainya peningkatan partisipasi masyarakat madani (*civil society*) dan media massa yang berperan sebagai partner, rekanan, serta pengontrol dan penyeimbang (*check and balance*) jalannya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam bingkai kehidupan berbangsa dan bernegara demi terwujudnya kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

Arah pembangunan jangka panjang Kota Magelang tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kota Magelang sebagai pusat pelayanan jasa yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan fasilitas yang memadai, diarahkan melalui :
  - a. Peningkatan pembangunan dan pengembangan fasilitas sarana dan prasarana perkotaan.
  - b. Peningkatan aksesibilitas untuk mendapatkan pelayanan publik.
  - c. Peningkatan kemampuan dan ketrampilan Sumber Daya Manusia.
2. Mewujudkan masyarakat Kota Magelang yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab diarahkan melalui :
  - a. Pembentukan karakter masyarakat yang berakhlak mulia dan bermoral berdasarkan falsafah Pancasila. Dicitrakan dengan watak, perilaku masyarakat yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong dan berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi iptek dan sumber daya manusia yang berkualitas.
  - b. Peningkatan pemahaman dan pengamalan agama serta nilai-nilai luhur budaya dalam kehidupan dan penghidupan sehari-hari masyarakat Kota Magelang.
  - c. Pemantapan budaya dan kearifan lokal masyarakat kota Magelang yang memiliki jati diri untuk mendukung harkat dan martabatnya, serta memperkuat ketahanan dan modal sosial masyarakat dalam suasana

kebersamaan, kegotong-royongan, saling peduli dan saling membantu dalam membangun keluarga sejahtera secara mandiri.

3. Mewujudkan daya saing daerah melalui pengelolaan pembangunan Kota Magelang yang efisien, efektif, profesional, berwawasan lingkungan, mengembangkan potensi daerah secara kreatif, inovatif, didukung oleh penguasaan iptek dan sumber daya manusia yang berkualitas, diarahkan melalui:
  - a. Peningkatan kualitas pelayanan beserta sumber daya manusianya di berbagai aspek sehingga mempunyai daya saing yang dapat diandalkan dalam mendukung pertumbuhan perekonomian.
  - b. Peningkatan profesionalitas dalam pengelolaan pembangunan kota yang disertai peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukungnya sehingga mampu menjadi penyangga wilayah sekitar.
  - c. Pengelolaan lingkungan hidup kawasan perkotaan dengan meningkatkan kualitas ruang-ruang terbuka hijau dan taman-taman kota serta menjaga kualitas air, udara serta sumber daya alam lainnya dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
  - d. Penciptaan iklim yang kondusif sebagai pendukung kreativitas masyarakat untuk menciptakan inovasi dalam mengembangkan potensi kota.
  - e. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan teknologi sesuai perkembangannya sebagai pendukung profesionalitas dan kinerja masyarakat dalam partisipasinya melaksanakan pembangunan.
4. Mewujudkan perekonomian Kota Magelang yang bertumpu pada penguatan ekonomi kerakyatan, penciptaan iklim usaha yang kondusif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang ditandai dengan penurunan angka kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat, diarahkan melalui :
  - a. Penguatan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan daya saing Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi;
  - b. Penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pendukung pengembangan sektor industri kecil, perdagangan dan jasa-jasa lainnya;
  - c. Penyediaan sumber daya manusia berkualitas yang mampu mendukung pengembangan-pengembangan usaha di Kota Magelang;
  - d. Penumbuhkembangan lembaga keuangan sebagai pendukung pengembangan ekonomi daerah;
  - e. Peningkatan kerjasama ekonomi antar daerah/wilayah;
  - f. Peningkatan peran pemerintah dalam memfasilitasi peningkatan permodalan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi;

- g. Peningkatan peran serta masyarakat dalam penciptaan lapangan kerja melalui usaha ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
  - h. Peningkatan sistem kelembagaan dan infrastruktur perekonomian yang maju;
  - i. Peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat melalui perluasan kesempatan kerja;
  - j. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui peningkatan investasi dan ekspor.
  - k. Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar, penguatan produktivitas, dan perlindungan sosial.
5. Mewujudkan *good governance* dan *clean goverment* dengan melibatkan dunia usaha, masyarakat madani (*civil society*), dan media massa untuk menuju kehidupan masyarakat Kota Magelang agamis, damai, demokratis, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kebenaran, diarahkan melalui :
- a. Peningkatan kualitas pelayanan umum yang didukung oleh SDM aparatur pemerintah yang profesional;
  - b. Penciptaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
  - c. Penciptaan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Magelang;
  - d. Penegakan Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mencerminkan keadilan dan kebenaran;
  - e. Pemberian peran dan fungsi yang proporsional terhadap dunia usaha, masyarakat madani, dan media massa untuk berkiprah dalam proses pelaksanaan pembangunan daerah.

Untuk mencapai tujuan ***Magelang Sebagai Kota Jasa Yang Berbudaya, Maju dan Berdaya Saing Dalam Masyarakat Madani***, akan dilaksanakan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. RPJM Daerah Ke-1 (2005-2010), Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahap sebelumnya, RPJM Daerah ke-1 diprioritaskan untuk meletakkan sendi-sendi pokok sebagai kota jasa yaitu dengan mengupayakan:
  - a. Melengkapi sarana dan prasarana fisik sebagai pendukung penyelenggaraan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan;
  - b. Penyempurnaan sarana dan prasarana pelayanan dasar;
 tanpa mengabaikan pembangunan di bidang lain sebagai upaya menuju masyarakat yang lebih sejahtera.

2. **RPJM Daerah Ke-2 (2011-2015), Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM Daerah Ke-1, RPJM Daerah Ke-2 diprioritaskan untuk:**
- a. **Mewujudkan Kota Magelang yang berbudaya, maju dan berdaya saing melalui upaya-upaya peningkatan kualitas SDM;**
  - b. **Memantapkan peran dan fungsi lembaga pemerintah, swasta, masyarakat madani, dan media massa sebagai pendukung pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan;**
  - c. **Memberi pelayanan masyarakat yang lebih baik dibandingkan dengan daerah-daerah lain;**
- tanpa mengabaikan pembangunan di bidang lainnya.**
3. RPJM Daerah Ke-3 (2016-2020), Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM Daerah Ke-2, RPJM Daerah Ke-3 diprioritaskan untuk:
- a. Meningkatkan dan memantapkan upaya menyejahterakan masyarakat melalui optimalisasi peran dan fungsi lembaga pemerintah, swasta, masyarakat madani, dan media massa khususnya dalam pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan;
  - b. Menciptakan peluang kerja dalam bidang pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan;
- tanpa mengabaikan pembangunan di bidang lain sebagai upaya menuju masyarakat yang berdaya dan mandiri.
4. RPJM Daerah Ke-4 (2021-2025), Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM Daerah Ke-3, RPJM Daerah Ke-4 diprioritaskan untuk:
- a. Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang;
  - b. Mewujudkan tercapainya perekonomian daerah yang berdaya saing tinggi, berlandaskan budaya yang unggul, sumber daya manusia yang berkualitas dan mandiri;
  - c. Mewujudkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat madani.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2011-2015 mengakomodasikan penekanan pelaksanaan pembangunan daerah berdasarkan pada **pentahapan pembangunan jangka menengah yang ke-2** sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJPD Kota Magelang Tahun 2005 – 2025 tersebut di atas.

## 8.2. Tahapan Pembangunan Jangka Menengah

Dalam upaya pencapaian visi misi Kota Magelang Tahun 2011-2015 perlu disusun tahap-tahap pembangunan lima tahun ke depan dengan mendasarkan kepada Visi Kota Magelang yakni: "**Terwujudnya Kota Magelang sebagai Kota Jasa Yang Maju, Profesional, Sejahtera, Mandiri dan Berkeadilan**", serta Misi Kota Magelang yang meliputi:

- 1) Menciptakan pemerintahan yang bersih dan profesional dengan peningkatan kapasitas dan responsibilitas aparatur didasarkan pada nilai-nilai kebenaran dan berkeadilan.
- 2) Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan mendorong tumbuhnya iklim investasi untuk pengembangan usaha yang mampu membuka peluang penyerapan tenaga kerja yang luas bagi masyarakat.
- 3) Memperkuat dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian kerakyatan dengan mengoptimalkan potensi daerah yang didukung oleh kemandirian masyarakat.
- 4) Meningkatkan pembangunan pelayanan perkotaan dengan pengembangan budaya daerah disertai dengan peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dengan mengedepankan aspek kemandirian.
- 5) Mendorong peningkatan derajat kesehatan, pengembangan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia yang cerdas, terampil, kreatif, inovatif dan memiliki etos kerja yang tinggi.
- 6) Mengembangkan faham kebangsaan dan meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan guna mewujudkan rasa aman dan ketentraman masyarakat.

Disamping itu juga mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Magelang Tahun 2005-2025 serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013. Agar dalam pelaksanaan program pembangunan dapat lebih fokus dan lebih tepat sasaran mulai dari tahun pertama sampai dengan tahun kelima, maka dalam pelaksanaannya secara makro akan dibagi ke dalam 3 (tiga) tahap. Tahap-tahap ini akan dilakukan melalui pemilahan ke enam misi kota yang disesuaikan dengan kronologi yang sistematis, realistis dan logis.

1. **Tahap Pemaduan dan konsolidasi** (Tahun 2011), dalam tahun ini pengejawantahan misi akan difokuskan kepada tujuan pembangunan untuk:
  - a. Melaksanakan evaluasi kinerja tahun sebelumnya, dimana tahun ini akan melihat capaian pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun 2010, utamanya kondisi sarana dan prasarana fisik sebagai pendukung

penyelenggaraan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan serta sarana dan prasarana pelayanan dasar yang akan digunakan sebagai dasar pijakan untuk melanjutkan kesinambungan program tahun pertama dari RPJMD Kota Magelang.

- b. Atas dasar hasil evaluasi RPJMD Kota Magelang Tahun 2005-2010, dan dalam rangka peletakan sendi-sendi dasar pro-investasi daerah diketahui bahwa capaian pembangunan sarana dan prasarana fisik khususnya terhadap pendukung penyelenggaraan jasa perekonomian belum dapat direalisasikan dengan baik. Baik terhadap pengembangan wilayah perekonomian baru maupun optimalisasi sarana dan prasarana perekonomian yang lama. Untuk itu dalam tahun 2011, program ini masih menjadi prioritas yang akan dilaksanakan.
  - c. Meningkatkan dan menciptakan kondisi yang nyaman dan aman kepada birokrasi, lembaga legislatif, berbagai lapisan masyarakat dan pihak swasta agar dalam mengambil peranan masing-masing dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.
  - d. Meningkatkan kapabilitas, responsibilitas, profesionalitas dan kompetensi aparatur pemerintah daerah yang dimulai pada saat rekrutment, penempatan dan sampai dengan purna tugas sebagai modal utama di dalam upaya memberikan pelayanan publik yang lebih baik.
2. **Tahap Percepatan** (Tahun 2012-2014), tiga tahun dalam tahap percepatan ini akan melaksanakan penjabaran dari misi ke dua sampai dengan misi ke enam dengan fokus tujuan pembangunan untuk:
- a. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan yang akan digunakan sebagai modal utama pembangunan daerah, melalui: meningkatkan koordinasi kepada institusi yang berwenang mendistribusi dana DAK, Dekonsentrasi, Dana Hibah dan bantuan lainnya agar dana yang diterima daerah betul-betul daerah; melakukan berbagai bentuk kerja sama dengan pihak swasta dan lembaga keuangan agar berbagai program pembangunan dapat dibantu pembiayaannya dengan prinsip kerjasama yang saling menguntungkan; Melakukan optimalisasi dan rasionalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah;
  - b. Menumbuhkembangkan kegiatan perekonomian yang didasarkan pada pengembangan investasi yang berwawasan lingkungan, melalui: kerjasama dengan daerah-daerah lain, pihak swasta dan Penanam Modal

Dalam Negeri agar dapat menyerap tenaga kerja dan terjadi peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah;

- c. Membuka peluang penyerapan tenaga kerja serta pendayagunaan tenaga kerja yang luas bagi masyarakat, melalui: pembukaan bursa tenaga kerja baik peluang kerja dalam daerah, skala nasional maupun internasional di setiap kelurahan yang dilakukan secara *on-line*; membuka dan mengoptimalkan fungsi Balai Latihan Kerja (BLK) untuk menambah ketrampilan, kreatifitas dan inovasi calon tenaga kerja wira usaha maupun yang akan bekerja di lembaga swasta maupun pemerintah.
- d. Mengembangkan daya saing sektor riil, melalui: pencetakan wira usahawan baru dari berbagai lapisan masyarakat yang menekuni berbagai bidang yang berupa klaster-sentra Industri Kecil Menengah (IKM), industri rumah tangga dan perdagangan masyarakat lainnya; peningkatan produktifitas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), peningkatan kemampuan kelembagaan yang menangani Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) dan penataan kawasan PKL yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota (RTRK).
- e. Mewujudkan pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK), melalui: peningkatan jumlah UMKMK di berbagai bidang usaha dan sekaligus pemberian fasilitas kredit lunak kepada UMKMK yang bisa berkembang baik.
- f. Mewujudkan peningkatan ketahanan pangan, melalui: penyusunan regulasi ketahanan pangan; penyediaan pangan utama dan pelaksanaan diversifikasi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
- g. Mewujudkan pengembangan agribisnis, melalui: Penyelenggaraan pelatihan pelaku usaha pertanian, peternakan dan pertanian; peningkatan jumlah jenis bidang usaha agribisnis dan jumlah tempat pengolahan hasil pasca panen.
- h. Mewujudkan terjadinya peningkatan produksi pertanian, melalui: peningkatan produktifitas padi dan jenis tanaman pertanian lainnya; Peningkatan produktifitas ternak dan ikan; peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok tani dan peningkatan penggunaan teknologi tepat guna dalam mengelola pertanian.

- i. Mewujudkan perlindungan hutan, melalui: pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan kritis serta penanganan kawasan hutan yang mengalami kerusakan.
- j. Mewujudkan sarana dan prasarana infrastruktur perkotaan yang memadai, melalui: perbaikan jalan, jembatan dan saluran irigasi yang kurang memadai; perbaikan dan penambahan jaringan air bersih untuk masyarakat; pembangunan pasar Rejowinangun serta penataan dan penampungan PKL; Pengaturan dan penanganan air limbah; peningkatan jumlah rumah layak huni untuk mengurangi kawasan kumuh; peningkatan jaringan pelayanan persampahan; penataan lingkungan kota dengan memperhatikan AMDAL; pengembangan infra struktur kawasan strategis dan cepat tumbuh; penataan kota yang mengacu kepada Rencana Tata Ruang Kota; penataan sarana dan prasarana transportasi yang memadai; penataan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi masyarakat; peningkatan kualitas sarana dan prasarana obyek daya tarik pariwisata.
- k. Melaksanakan penggalian dan pemeliharaan potensi kebudayaan serta peningkatan pengelolaan keragaman budaya, melalui: peningkatan jumlah lembaga atau kelompok seni dan budaya yang aktif; pengembangan fungsi sistem informasi pariwisata dan kebudayaan.
- l. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang berdampak pada pembangunan berdasarkan kemandirian daerah, melalui: penerapan teknologi tepat guna (TTG); peningkatan peran dan fungsi penjangkauan Kreatifitas dan Inovasi (KRENOVA) masyarakat dalam pembangunan daerah; peningkatan peran dan fungsi kelompok masyarakat yang terlibat dalam pencegahan penyakit dan pemeliharaan kesehatan; peningkatan peran dan fungsi Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) dalam berbagai program pembangunan; peningkatan peran dan fungsi Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sebagai salah satu motivator dan penggerak perekonomian masyarakat; pemberdayaan perempuan dalam proses pembangunan; pengarus utamaan gender dan perlindungan anak dalam proses pembangunan daerah;
- m. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perkotaan dengan meningkatkan derajat kesehatan dan pendidikan agar menjadi masyarakat yang sehat, peningkatan kualitas tenaga kesehatan; pemenuhan rasio jumlah tenaga kesehatan yang melayani masyarakat; penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai,

pelaksanaan sistem informasi kesehatan yang terpadu; pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang menggunakan standar ISO; peningkatan cakupan pelayanan kesehatan rujukan keluarga miskin; peningkatan usia harapan hidup (UHH) menjadi 71 tahun; penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB); peningkatan gizi masyarakat; pengurangan kasus penyakit menular; peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan; peningkatan jaminan keamanan makanan dan obat bagi masyarakat; peningkatan kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan; peningkatan lingkungan hidup yang sehat; pelaksanaan pengendalian penduduk dan peningkatan kualitas keluarga bahagia dan sejahtera; peningkatan pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial dan penyandang penyakit sosial; peningkatan kualitas dan pemerataan mutu dan akses pendidikan anak usia dini (PAUD); peningkatan kualitas, pemerataan akses dan mutu pendidikan dasar; peningkatan dan pemerataan akses, mutu dan relevansi jenjang pendidikan menengah; peningkatan dan pemerataan akses, mutu, relevansi dan daya saing pendidikan non formal dan imformal; peningkatan dan pemerataan akses, mutu, relevansi dan daya saing pendidikan khusus; peningkatan kinerja pendidikan dan kependidikan; peningkatan wawasan kebangsaan kearifan lokal dan kesetaraan gender dalam penyelenggaraan pendidikan; peningkatan minat baca masyarakat; peningkatan kualitas dan partisipasi generasi muda dalam pembangunan daerah; peningkatan dan optimalisasi pembinaan dan pembibitan kader olah raga prestasi secara kontinyu.

- n. Menanamkan rasa kebangsaan kepada masyarakat Kota Magelang sehingga muncul rasa bangga terhadap bangsa Indonesia, melalui: peningkatan kesadaran wawasan kebangsaan masyarakat; peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum (PEMILU) presiden, PEMILU Legislatif dan PEMILU Kepala Daerah.
- o. Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME, melalui: peningkatan kualitas pelaksanaan norma-norma agama dalam hidup bermasyarakat.
- p. Mewujudkan rasa aman dan ketentraman di masyarakat, melalui: peningkatan ketertiban dan keamanan di masyarakat; peningkatan profesionalitas aparat kamtibmas, satlinmas, SAR dan Satuan Polisi Pamong Praja; peningkatan pemahaman dan kemampuan aparatur dan masyarakat dalam menangani resiko korban bencana; peningkatan

pembinaan politik di daerah dan peningkatan pembinaan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Masyarakat (Ormas).

### 3. Tahap Pemantapan (Tahun 2015)

Pada tahap ini adalah merupakan tahap akhir dalam upaya mencapai visi "Terwujudnya Kota Magelang sebagai Kota Jasa Yang Maju, Profesional, Sejahtera, Mandiri dan Berkeadilan". Pencapaian visi ini setidaknya akan ditandai oleh kondisi-kondisi:

- a. *Partisipasi Masyarakat*, Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif; *Tegaknya Supremasi Hukum*, Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia; *Transparansi*, Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau; *Peduli pada Stakeholder*, Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan; *Berorientasi pada Konsensus*, Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur; *Kesetaraan*, Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka; *Efektifitas dan Efisiensi*, Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin; *Akuntabilitas*, Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggung jawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan; *Visi Strategis*, Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan

yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

- b. Adanya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang di dalamnya mencerminkan adanya peningkatan Indeks Harapan Hidup (IHH) yang mencakup aspek umur panjang dan derajat kesehatan, Indeks Pendidikan (IP) yang tercermin dari angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah serta adanya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dan Indeks Hidup Layak (IHL) yang dapat dilihat dari meningkatnya daya beli masyarakat dan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi dalam arti yang lebih luas.

Agar dapat melihat tingkat ketercapaian pelaksanaan pembangunan dalam 4 (empat) tahun pelaksanaan RPJMD sebagaimana telah diuraikan secara garis besar tersebut di atas, maka perlu dilaksanakan evaluasi secara menyeluruh terhadap program-program yang tertuang di dalam RPJMD. Dari hasil evaluasi tersebut, apabila indikator-indikator yang dicapai sudah sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program pembangunan sudah berjalan sesuai *track-nya*, sehingga pelaksanaan pembangunan pada tahun 2015 hanya bersifat menguatkan saja. Namun apabila sebaliknya maka program pembangunan pada tahun 2015 harus melengkapi terhadap apa yang masih mengalami ketidaksesuaian.

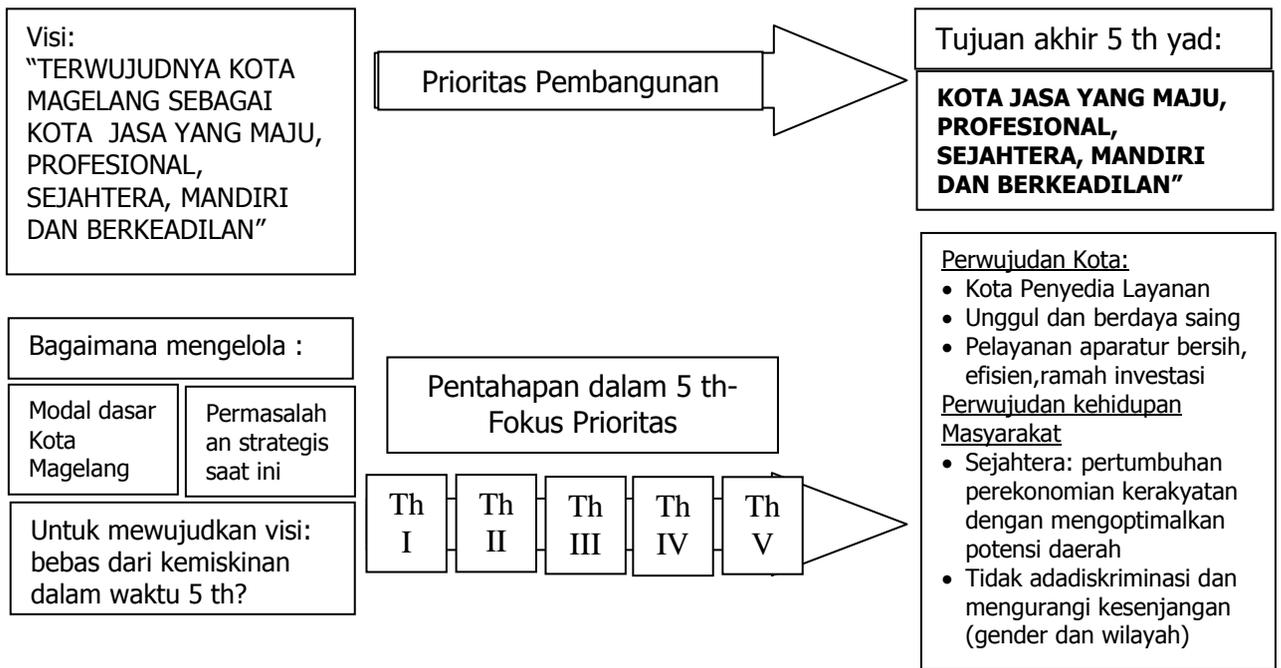
### **8.3. Prioritas Pembangunan Daerah Jangka Menengah**

Tahapan yang diuraikan pada bagian di atas adalah pentahapan dari alur mekanisme pencapaian visi. Selanjutnya pada bagian ini akan diuraikan prioritas dan fokus tahapan pencapaiannya dari segi substansi isi kebijakan, supaya pencapaian visi lebih mudah untuk diterjemahkan dalam perencanaan tahunan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Prioritas dan tahapan pembangunan yang dimaksud mengacu pada sasaran akhir kepemimpinan Walikota periode 2011-2015 yang tercantum dalam visinya. Alur pemikiran ini dapat digambarkan dalam diagram berikut:

**Gambar VIII.1**

**Alur Pemikiran Penentuan Prioritas Pembangunan Daerah**



**Indikator Pengukuran Pencapaian Sasaran Visi 2015: "Kota Jasa"**

**A. Kota Jasa:**

Kota yang menyediakan pelayanan jasa dengan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dibanding daerah sekitarnya sehingga menjadi pilihan tujuan pengguna jasa.

Dilihat dari modal dasar, tantangan dan peluang yang dimiliki kota Magelang, fokus pengembangannya 2011-2015 direncanakan ke arah **Kota Perdagangan dan Jasa Pendukung berbasis ekonomi kerakyatan.**

Penjelasan yang dimaksud sebagai **Kota Perdagangan dan Jasa Pendukung berbasis ekonomi kerakyatan** adalah:

- Kota Perdagangan artinya: penghubung produsen (daerah sekitar) dan konsumen tingkat regional dan nasional, secara khusus untuk hasil pertanian (dalam arti luas) dan pengolahan hasil pertanian
- Kota Jasa Pendukung artinya kota Magelang juga mengembangkan:
  - **Industri pengolahan hasil pertanian dalam arti luas** untuk memberi nilai tambah hasil pertanian dari daerah sekitar yang dipooling di Kota Magelang sebelum didistribusikan ke daerah-daerah lain
  - **Pariwisata edukasi** (sesuai potensi wisata yang dimiliki Kota Magelang) untuk mendukung perluasan pemasaran hasil industri pengolahan hasil pertanian
  - **Jasa layanan primer:** penginapan dan restoran untuk melayani orang dari luar kota yang berbisnis terkait di wilayah magelang dan sekitarnya. Hal ini juga

untuk menyambung peluang keberadaan perguruan tinggi (Negeri) di Kota Magelang bagi pengguna jasa pendidikan, serta peluang pengembangan RSU Tidar Kota Magelang sebagai Rumah Sakit Rujukan

- **Jasa Pendidikan vokasional (formal dan non formal)**
- **Jasa pelayanan kesehatan** dasar yang berkualitas
- **Jasa pusat-pusat perdagangan kerakyatan** (kuliner, souvenir)
- **Jasa hospitality**, misalnya: *public area/rilex area* yang memfasilitasi masyarakat Kota Magelang maupun *traveller* untuk bersantai, namun secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada geliat perekonomian atau transaksi perdagangan.

Keberadaan jasa pendukung diarahkan untuk mendukung kekuatan Kota Magelang sebagai kota tujuan transaksi perdagangan

## **B. Kehidupan Sejahtera:**

Sebagai patokan (*benchmarking*), dalam RPJM Nasional tahun 2009-2014, Pemerintah Pusat menargetkan tingkat kemiskinan 7% pada tahun 2014, tingkat pengangguran bisa ditekan hingga menjadi 5% - 6% pada 2014, pertumbuhan ekonomi yang sudah ditetapkan hingga 2014 antara 5,6% s/d 7%.

Pada level regional, berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 telah ditetapkan target-target di tahun 2013, yaitu: IPM sebesar 74,3, target IPG tahun 2013 ditetapkan sebesar 65,9 sementara untuk IDG sebesar 61,8, ditetapkan sebesar 0,23, Indeks Williamson sebesar 0,69, angka pertumbuhan ekonomi sebesar 6,66 % dan inflasi sebesar 8,59 %, persentase penduduk miskin ditargetkan sebesar 13,27 % dan angka pengangguran sebesar 7,34 %.

Berdasarkan target nasional dan Jawa Tengah tersebut maka target lima tahun ke depan pembangunan di Kota Magelang

1. Indeks Pembangunan Manusia tahun 2015 sebesar 78,44 dengan rincian Angka Harapan Hidup mencapai 70,93 tahun, Angka Melek Huruf 100 %, Rata-rata Lama Sekolah 10,37 tahun, dan Pengeluaran Riil Perkapita mencapai Rp. 658.750.
2. Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,69 % dan laju inflasi 5,30 di tahun 2015.
3. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 10 - 12 %
4. Jumlah orang miskin tahun 2015 sebesar 9 - 11%.
5. PDRB tahun 2015 Rp. 9,552,690.67 juta.
6. Kenaikan investasi dari masyarakat (sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan) di tahun 2015 mencapai Rp. 588,261.33 juta
7. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 74,00 dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebesar 76,50 di tahun 2015.
8. Indeks gini sebesar 0,261

9. Indeks Williamson sebesar 0,162

10. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal atas pelayanan dasar

Fokus prioritas untuk mempercepat pencapaian **KOTA JASA YANG MAJU, PROFESIONAL, SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERKEADILAN**” pada tahun 2015 ini tersirat dari visi Walikota memuat tiga unsur yang perlu digarap, yaitu:

1. Fokus Prioritas Ekonomi, untuk meningkatkan pendapatan, daya beli, dan kemampuan investasi masyarakat, sehingga meningkatkan kapasitas masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan. Fokus ini mempercepat pencapaian masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan berkeadilan
2. Fokus Prioritas pemenuhan hak-hak kebutuhan dasar utama masyarakat yaitu kesehatan, pendidikan, pangan, papan, terutama kelompok rentan. Pemenuhan hak dasar fisik ini juga pemenuhan hak dasar non fisik, yaitu pemenuhan kebutuhan kebebasan beragama dan berdemokrasi. Fokus ini mencapai masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan.
3. Fokus prioritas *governance*, yaitu pengembangan tata pemerintahan dan hubungan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat berlandaskan asa profesionalitas. Fokus ini membantu mengurangi tingkat penyalahgunaan wewenang dan anggaran, sehingga pemanfaatan sumberdaya daerah lebih fokus pada upaya mempercepat pengembangan Kota Magelang sebagai kota Jasa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

Berpijak dari unsur fokus yang tersirat dari visi Walikota tersebut, maka fokus prioritas daerah Kota Magelang 2011-2015 akan diarahkan pada:

1. **Pembangunan ekonomi** daerah berbasis perdagangan dan jasa lainnya (industri pengolahan, pariwisata, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa primer, dan jasa *hospitality*)
2. **Pemenuhan kebutuhan dasar** kesehatan, pendidikan, papan, dan pangan didukung pengembangan sarana prasarana daerah, dan pembangunan sosial budaya kemasyarakatan untuk meningkatkan kesejahteraan, kemandirian dan keadilan di masyarakat.
3. **Pengembangan tata pemerintahan** dan hubungan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat berlandaskan prinsip profesionalitas untuk membangun keunggulan kompetitif sebagai kota Perdagangan dan Jasa.

Secara khusus peran pemerintah dalam pengembangan ekonomi daerah dapat mengambil beberapa bentuk, yakni:

- WIRAUSAHA, dimana Pemerintah daerah bertindak untuk mencari peluang-peluang usaha yang dapat dikembangkan oleh masyarakat maupun oleh daerah melalui usaha kemitraan dengan memanfaatkan sumber daya daerah secara arif.

- KOORDINATOR, dimana Pemerintah daerah bertindak sebagai koordinator dalam menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi bagi pembangunan daerah
- FASILITATOR, dimana Pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan dan perilaku masyarakat di daerahnya, serta mampu menjembatani terjalinnya hubungan yang kuat antara produsen dengan konsumen dalam sistem rantai pemasaran.
- STIMULATOR dimana Pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan khusus yang akan mempengaruhi investor dan stakeholders daerah.
- REGULATOR, dimana daerah dapat membuat kebijakan dan peraturan yang dapat mendorong iklim usaha dan investasi yang menarik.

Pengembangan prioritas perlu memperhatikan kondisi eksisting Kota Magelang, yaitu potret permasalahan kesejahteraan masyarakat dan modal dasar daerah. Dari kondisi eksisting permasalahan kesejahteraan masyarakat, pokok pangkal untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan dan pemenuhan hak-hak dasar atau isu strategisnya antara lain:

1. Penciptaan peluang kerja dan usaha di bidang perdagangan dan industri pengolahan dan jasa pendukung lainnya berbasis ekonomi kerakyatan untuk mengatasi pengangguran
2. Pengembangan pendidikan diarahkan pada pendidikan vokasional untuk menyiapkan tenaga kerja terampil sesuai kebutuhan lapangan kerja.
3. Pengembangan pelayanan kesehatan pada pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas
4. Pengembangan sarana prasarana lingkungan yang berdampak langsung untuk mengurangi resiko penyakit menular lingkungan, seperti sanitasi, air bersih.

Dari modal dasar Kota Magelang, isu strategis pengembangannya adalah:

1. Dilihat dari potensi lokasinya, Kota Magelang memiliki letak yang strategis pada jalur terletak di tengah-tengah Kabupaten Magelang serta berada di persilangan lalu lintas ekonomi dan wisata antara Semarang - Magelang - Yogyakarta dan Purworejo-Temanggung, sehingga Kota Magelang merupakan salah satu wilayah strategis di tengah-tengah Provinsi Jawa Tengah dengan penetapan menurut Rencana Tata Ruang Nasional dan Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Kawasan Purwomanggung (Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kota Magelang, dan Kabupaten Magelang). Dengan posisi *diffusive center* ini, maka kota itu menjadi pusat layanan berbagai jasa dan simpul transportasi bagi kabupaten-kabupaten di sekitarnya.

2. Jika dilihat daerah sekitar mayoritas penghasil pertanian, maka Kota Magelang potensi menjadi distributor hasil pertanian atau pengolah hasil pertanian, sekaligus menjadi pos transit transaksi perdagangan, khususnya hasil-hasil pertanian
3. Jika dilihat pertumbuhan sektor PDRB; nilai tambah pertumbuhan sektor perdagangan besar (6.11 %), dan jasa keuangan juga besar (5,49 %). Ini menunjukkan transaksi masyarakat kota Magelang yang cukup besar.

Maka alternatif pengembangan sebagai kota jasa yang memfasilitasi:

- a. Transit perdagangan, Pusat penyalur/distributor perdagangan: usaha jasa dan perdagangan seperti pertokoan dan supermarket, hotel, rumah makan, jasa transportasi dan jasa hiburan.
- b. Pengembangan industri pengolah hasil pertanian (dalam arti luas).
- c. Jasa pendukung bagi perkembangan layanan unggulan jasa yang diperkirakan akan berkembang yaitu pendidikan dan kesehatan, yaitu jasa penginapan, rumah makan, pertokoan

Prioritas pembangunan untuk mewujudkan visi Walikota 2011-2015 dengan fokus sebagai Kota Perdagangan dan Jasa ini akan dicapai dalam 5 tahun, sehingga diperlukan penajaman-penajaman dalam suatu pentahapan tahunan. Dalam pentahapan fokus ini akan mengombinasikan tiga unsur utama sebagaimana tersirat dalam visi Walikota, yaitu unsur **Pembangunan ekonomi, Pemenuhan kebutuhan dasar, dan Pengembangan tata pemerintahan (*Governance*)**. Fokus prioritas dalam pentahapan tahunan dinyatakan sebagai tema pembangunan tahunan, sebagai berikut:

#### **1. Tahun pertama perencanaan (RKPD 2012):**

Tema dasarnya adalah **Membangun Dasar**, melalui Penguatan dasar tata kelola kota daerah menyiapkan kota Magelang menjadi simpul distribusi perdagangan dan jasa pendukung lainnya (industri, pariwisata, pendidikan, jasa primer pendukung, jasa hospitality) melalui **pengembangan sarana prasarana utama dan pendukung menguatnya jaringan jalur perdagangan regional melalui kota Magelang** dan **penguatan fasilitas** pelayanan dasar masyarakat *pro job* (mendorong pertumbuhan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja).

Penekanan pada Tahun I adalah:

- a. Adanya kajian:
  - Potensi unggulan dan andalan daerah yang akan dikembangkan industrialisasinya
  - Analisis profil pelaku ekonomi Kota Magelang berdasar gender, bidang usaha, sebaran

- Identifikasi pengusaha Kota Magelang (sebagai kelompok investor lokas)
  - Tentang rencana pengembangan tata kota dan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk menghidupkan jalur perdagangan
- b. Adanya komitmen daerah pengembangan kota jasa berbasis perdagangan, ditunjukkan dengan adanya regulasi daerah (Perda datau Perwali) yang memberi insentif pada upaya swasta dan masyarakat untuk mengembangkan Kota Magelang , menjadi:
- Kota simpul jasa perdagangan
  - Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian
  - Pengembangan pendidikan vokasi (formal dan non formal)
  - Jasa primer: rumah makan, kos-kosan
  - Jasa hospitality: ruang publik untuk berinteraksi dan berekreasi
- c. Penyiapan sistem dan sarana-prasarana yang mendukung layanan administrasi dan perijinan yang transparan, responsif, akuntabel, cepat
- d. Pembangunan sarana prasarana wilayah dan tata kota yang memfasilitasi masyarakat:
- Dapat membuat produknya (barang atau jasa) dikenal dan dibeli
  - Penataan kota yang mendukung pengembangan perdagangan rakyat (pasar, sentra kios) di tempat-tempat strategis jalur penghubung daerah luar
- e. Adanya regulasi yang menunjukkan komitmen pemerintah kota untuk jaminan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, pangan, papan, dan lingkungan sehat.

<b>Th ke</b>	<b>Tema Dasar</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Prioritas Pembangunan Daerah</b>
<b>I</b>	Membangun dasar	1. MENYIAPKAN KOTA MAGELANG MENJADI SIMPUL DISTRIBUSI PERDAGANGAN DAN JASA PENDUKUNG LAINNYA lainnya (industri, pariwisata, pendidikan, jasa primer pendukung, jasa hospitality) 2. Mengurangi pengangguran 3. Mengurangi jumlah penduduk miskin	1. PENGUATAN DASAR TATA KELOLA KOTA (penyiapan regulasi, kajian /analisis daerah) untuk mengembangkan Magelang sbg kota jasa perdagangan dan jasa pendukung lainnya 2. Pengembangan sarana-prasarana untuk mengoptimalkan posisi sbg kota jalur perdagangan 3. Menyiapkan kebijakan dan membangun sarana prasarana yang memberi insentif tumbuhnya ekonomi rakyat (pedagang kecil, pedagang informal, pedagang pasar tradisional, industri rumah tangga, UMKM) 4. Menyiapkan kebijakan Memberi insentif pengembangan pendidikan vokasional baik formal maupun non formal 5. Menyiapkan kebijakan adanya jaminan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, pangan,

Th ke	Tema Dasar	Tujuan	Prioritas Pembangunan Daerah
			<p>papan, dan lingkungan sehat</p> <p>6. Mensosialisasikan rencana pengembangan kota Magelang kepada masyarakat hingga tingkat terendah (satuan RT/RW) untuk mendapatkan dukungan partisipasi warga</p> <p>7. Mempromosikan kota magelang ke luar daerah: kemudahan izin usaha, pelayanan kesehatan khusus, Pelayanan pendidikan, fasilitas perdagangan, wisata edukasi</p> <p>8. Menyiapkan perangkat kebijakan pengawasan untuk menjamin praktik clean and good governance</p>

Prioritas Kebijakan	Urusan	SKPD
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian; Perencanaan Pembangunan	Setda, BP2T, Dinas Pasar, Bappeda
2	Pekerjaan Umum, Perhubungan	DPU, Dishubkominfo
3	Koperasi dan UKM, Perdagangan, Perindustrian	Diskoperindag
4	Pendidikan	Dinas Pendidikan
5	Pemberdayaan Masyarakat Desa	BPMPKB
6	Komunikasi dan Informatika	Dishubkominfo
7	Lingkungan Hidup	DKPT, Kantor LH

## 2. Tahun Kedua perencanaan (RKPD 2013):

Tema dasarnya adalah **Merintis Jalan**, melalui Pengembangan kerjasama antar pemerintah - dunia usaha – masyarakat melalui optimalisasi penggunaan jalur komunikasi dan informasi, untuk meningkatkan investasi mendukung Kota Magelang menjadi simpul distribusi perdagangan melalui pengembangan **industri** pengolahan hasil pertanian (dalam arti luas) berbasis ekonomi kerakyatan, dan penguatan **manajemen pelaksanaan** pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, pangan, papan) untuk **memperbesar cakupan layanan**.

Asumsi capaian Tahun I yang mendasari Tema Tahun II adalah bahwa pada tahun pertama sudah tertata modal dasar pengembangan kota yaitu:

- 1) Adanya komitmen daerah pengembangan kota jasa berbasis perdagangan. Komitmen ini ditunjukkan dengan adanya regulasi daerah (Perda atau Perwali) yang memberi insentif pada upaya swasta dan masyarakat untuk mengembangkan perdagangan di Kota Magelang.

- 2) Sudah ada komitmen dan perangkat teknologi atau sistem yang menjamin bahwa sistem pelayanan administrasi dan perijinan di Kota Magelang ramah investor, ramah bagi usaha ekonomi kerakyatan.
- 3) Sudah ada kajian detail tentang rencana pengembangan tata kota dan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk menghidupkan jalur perdagangan
- 4) Sudah ada kajian profil pelaku ekonomi dan potensial investor lokal Kota Magelang.
- 5) Sudah ada kajian potensi unggulan dan andalan daerah yang akan dikembangkan industrialisasinya.
- 6) Sudah ada sosialisasi tentang rencana penataan kota yang mendukung perkembangan perdagangan produk barang dan jasa, termasuk pedagang kecil (keberpihakan pada ekonomi kerakyatan)
- 7) Sudah dimulai pembangunan (fisik dan non fisik) fasilitas kota jasa perdagangan di kawasan strategis

Oleh karena itu penekanan prioritas pembangunan pada Tahun II adalah:

- a. Pemerintah mengembangkan media komunikasi dan informasi untuk mempermudah akses informasi pengembangan daerah dari pemerintah – dunia usaha – masyarakat dalam mendukung pengembangan Magelang sebagai kota jasa.
- b. Meningkatkan transparansi, akurasi, responsivitas, akuntabilitas pelayanan publik
- c. Pemerintah membangun kesepahaman dengan potensial investor lokal dan non lokal
- d. Pemerintah merintis pengembangan industri pengolahan produk unggulan dan andalan dari produk pertanian dari daerah sekitar untuk diberi nilai tambah sehingga dapat meningkatkan PDRB dan penyerapan tenaga kerja
- e. Pengembangan UMKM dan kluster ekonomi berbasis produk unggulan dan andalan daerah (barang atau jasa)
- f. Mempertahankan Standar pelayanan minimal kebutuhan dasar masyarakat terutama kelompok rentan termarginalisasi.

Th ke	Tema Dasar	Tujuan	Prioritas Pembangunan daerah
II	Merintis Jalan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. MENDAPATKAN INVESTASI UNTUK Mengembangkan KOTA MAGELANG MENJADI SIMPUL DISTRIBUSI PERDAGANGAN</li> <li>2. Menurangi pengangguran</li> <li>3. Memperbesar cakupan penerima pelayanan dasar masyarakat (terutama kelompok</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengembangkan media komunikasi dan informasi</li> <li>2. membangun kesepahaman dengan potensial investor lokal dan non lokal</li> <li>3. merintis pengembangan industri pengolahan produk unggulan dan andalan (dari sektor pertanian dalam arti luas)</li> <li>4. Pengembangan UMKM dan kluster ekonomi berbasis produk unggulan dan andalan daerah</li> <li>5. Pelayanan dasar utk kelompok masyarakat yg rentan termarginalkan</li> </ol>

Th ke	Tema Dasar	Tujuan	Prioritas Pembangunan daerah
		rentan) untuk Mengurangi jumlah penduduk miskin	

Prioritas Kebijakan	Urusan	SKPD
1	Komunikasi dan Informatika	Dishubkominfo
2	Penanaman Modal; Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian; Statistik	KPM, Setda (Bag Tapem), BP2T, Inspektorat, Kantor Litbang & Statistik
3.	Koperasi & UKM, Perdagangan, Perindustrian, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Pekerjaan Umum	Diskoperindag; Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan; DPU
4.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	BPMPKB
5.	Sosial	Disnakertransos

### 3. Tahun Ketiga perencanaan (RKPD 2014):

Tema dasarnya adalah **Memantapkan Langkah: unggulan daerah**, melalui Pengembangan kerjasama antar pemerintah - dunia usaha – masyarakat untuk meningkatkan keunggulan kompetitif produk lokal sebagai pencitraan kota Magelang melalui pengembangan sektor perdagangan, jasa, budaya dan pariwisata di tingkat regional sehingga berdampak pada **kapasitas daerah meningkatkan kualitas pelayanan dasar** (pendidikan, kesehatan, pangan, papan).

Asumsi capaian yang mendasari Tema Tahun III adalah pada tahun ke II sudah terbangun kesepahaman pemerintah - dunia usaha - masyarakat yang ditandai dengan:

1. Diperoleh investasi untuk industri pengolahan produk unggulan dan andalan (dari sektor pertanian dalam arti luas)
2. Terbentuk UMKM dan kluster ekonomi berbasis produk unggulan dan andalan daerah
3. Diperoleh kemitraan dengan dunia usaha atau organisasi kemasyarakatan untuk memperluas akses pelayanan dasar utk kelompok masyarakat yg rentan termarginalkan.

Oleh karena itu penekanan prioritas pembangunan pada Tahun III adalah:

- a. Memperluas sarana promosi pencitraan (*city brand image*) unggulan kota Magelang untuk meningkatkan cakupan pasar produk barang dan jasa dari masyarakat Kota Magelang (pameran, even budaya, menjadi tuan rumah acara2 regional & nasional, publikasi media)
- b. Memperlengkapi fasilitas dan jenis layanan jasa yang meningkatkan kenyamanan pelaku perdagangan di kota magelang

- c. Memadukan paket pariwisata – budaya dan perdagangan (pernak-pernik ikon budaya lokal magelang) untuk mengupayakan peningkatan kunjungan ke kota Magelang
- d. Peningkatan kemampuan pembiayaan penyelenggaraan pelayanan dasar (terutama untuk kelompok rentan termarginalkan) yang bersumber dari APBD, maupun kemitraan.

Th ke	Tema Dasar	Tujuan	Prioritas Pembangunan Daerah
III	Memantapkan langkah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. MENINGKATKAN KEUNGGULAN KOMPETITIF PRODUK LOKAL SEBAGAI PENCITRAAN KOTA MAGELANG</li> <li>2. Meningkatkan kualitas penyediaan layanan dasar (terutama bagi kelompok rentan untuk mengurangi kemiskinan)</li> <li>3. Meningkatkan pendapatan perkapita</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperluas sarana promosi pencitraan (city brand image) unggulan kota Magelang untuk meningkatkan cakupan pasar produk barang dan jasa dari masyarakat Kota Magelang (pameran, even budaya, menjadi tuan rumah acara2 regional &amp; nasional, publikasi media)</li> <li>2. Memperlengkapi fasilitas dan jenis layanan jasa yang meningkatkan kenyamanan pelaku perdagangan di kota magelang</li> <li>3. Memadukan paket pariwisata – budaya dan perdagangan (pernak-pernik ikon budaya lokal magelang) untuk mengupayakan peningkatan kunjungan ke kota Magelang</li> <li>4. Peningkatan kemampuan pembiayaan penyelenggaraan pelayanan dasar (terutama untuk kelompok rentan termarginalkan) yang bersumber dari APBD, maupun kemitraan</li> </ol>

Prioritas Kebijakan	Urusan	SKPD
1	Penanaman Modal, Koperasi & UKM, Perindustrian, Perdagangan, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	KPM , Diskoperindag, Setda (Bag Tapem), Dinas Pasar
2	Pekerjaan Umum, Perumahan, Lingkungan Hidup	DPU, DKPT, Kantor LH
3.	Kebudayaan, Pariwisata	Disporabudpar
4.	Pendidikan, Kesehatan, Ketahanan Pangan	Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, BPMPKB (Ketahanan Pangan)

#### 4. Tahun Keempat perencanaan (RKPD 2015):

Tema dasarnya adalah **Meraih Keunggulan: keuntungan kompetitif**, melalui Pemantapan dan perluasan keunggulan kompetitif Kota Magelang skala regional dan nasional untuk produk unggulan daerah dan pemantapan **kualitas layanan dasar untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia serta penurunan Indeks Kemiskinan Masyarakat.**

Asumsi yang mendasari tema Tahun IV adalah pada tahun ke III sudah ditemukan keunggulan kompetitif kota magelang dan sudah dilakukan upaya "Pencitraan Kota" yang ditandai dengan:

1. Sarana publik pendukung kenyamanan para pelaku perdagangan atau pengguna jasa lainnya lebih lengkap
2. Jumlah kunjungan ke Kota Magelang meningkat
3. PDRB meningkat
4. Ada tambahan kemitraan penyelenggaraan pelayanan dasar: kesehatan, pendidikan, pangan, perumahan/permukiman, kesehatan lingkungan

Oleh karena itu penekanan prioritas pembangunan Tahun IV adalah:

- a. Menambah jumlah investor yang digandeng untuk mengembangkan industri kreatif dan usaha menengah masyarakat Kota Magelang
- b. Kebijakan pemberian insentif bagi usaha yang menyerap banyak tenaga kerja lokal masyarakat kota Magelang
- c. Memfasilitasi perluasan jangkauan pemasaran industri kreatif melalui kerjasama antar daerah lintas regional
- d. Memantapkan capaian kuantitas dan kualitas pelayanan dasar.

Th ke	Tema Dasar	Tujuan	Prioritas Pembangunan Daerah
IV	Meraih keunggulan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperluas pasar kompetitif dalam skala regional</li> <li>2. Pendapatan perkapita meningkat</li> <li>3. Jumlah pengangguran dan orang miskin turun</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menambah jumlah investor yang digandeng untuk mengembangkan industri kreatif dan usaha menengah masyarakat kota Magelang</li> <li>2. Kebijakan pemberian insentif bagi usaha yang menyerap banyak tenaga kerja lokal masyarakat kota Magelang</li> <li>3. Memfasilitasi perluasan jangkauan pemasaran industri kreatif melalui kerjasama antar daerah lintas regional</li> <li>4. Memantapkan capaian kuantitas dan kualitas pelayanan dasar</li> </ol>

Prioritas Kebijakan	Urusan	SKPD
1	Koperasi & UKM, Penanaman Modal, Statistik, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Diskoperindag, KPM, Kantor Litbang & Statistik, Setda (Bag. Tapem, Bag. Hukum)
2	Tenaga Kerja	Disnakertransos
3.	Komunikasi dan Informatika	Dishubkominfo
4.	Pendidikan, Kesehatan, Ketahanan Pangan, Perumahan	Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, BPMPKB (ketahanan pangan), DPU (Cipta Karya)

**5. Tahun Kelima perencanaan (RKPD 2016):**

Tema dasarnya adalah **Meluaskan Jangkauan: dikenal tingkat nasional atau dunia**, melalui Pengembangan Perluasan kerjasama dan cakupan investasi untuk melanjutkan pengembangan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi, sarana prasarana daerah, sosial, dan budaya, yang berkeadilan bagi semua kelompok tanpa diskriminasi menuju Kota Magelang sebagai **KOTA JASA YANG MAJU, PROFESIONAL, SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERKEADILAN”**

Asumsi yang mendasari Tema pada Tahun V adalah pada Tahun IV keunggulan kompetitif Kota Magelang sudah diakui di regional dan nasional, yang ditandai dengan:

1. Peningkatan jumlah investor,
2. penambahan jenis layanan jasa di kota Magelang yang dilakukan oleh investor atau kemitraan
3. cakupan dan kualitas pelayanan dasar di atas standar pelayanan minimal

Oleh karena itu penekanan prioritas pembangunan pada Tahun V adalah:

- a. Meningkatkan partisipasi Kota Magelang di even nasional atau internasional (apabila memungkinkan) dengan menjadi tuan rumah atau partisipan plus
- b. Meningkatkan ruang partisipasi publik untuk perencanaan, implementasi, dan evaluasi program-program pembangunan
- c. Mempertahankan kualitas pelayanan dasar

Th ke	Tema Dasar	Tujuan	Prioritas Pembangunan Daerah
V	Meluaskan jangkauan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PERLUASAN KERJASAMA DAN CAKUPAN INVESTASI di tingkat nasional dan atau internasional</li> <li>2. Meningkatkan peringkat indeks pembangunan manusia skala regional dan nasional</li> <li>3. Angka kemiskinan dan pengangguran terendah dalam 5 tahun terakhir</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan partisipasi Kota Magelang di even nasional atau internasional (apabila memungkinkan) dengan menjadi tuan rumah atau partisipan plus</li> <li>2. Meningkatkan atau mempertahankan besaran investasi atau kemitraan</li> <li>3. Meningkatkan ruang partisipasi publik untuk untuk perencanaan, implementasi, dan evaluasi program-program pembangunan</li> <li>4. Mempertahankan kualitas pelayanan dasar</li> </ol>

Prioritas Kebijakan	Urusan	SKPD
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian; Komunikasi dan Informatika; Kebudayaan; Pariwisata	Setda (Bag Tapem), DPPKD, Dishubkominfo, Disporabudpar
2	Kesatuan Bangsa & Politik Dalam Negeri; Perencanaan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kesbangpolinmas, Bappeda, BPMPKB
3.	Pendidikan, Kesehatan, Ketahanan Pangan, Perumahan	Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, BPMPKB (ketahanan pangan), DPU (Cipta Karya)

Berikutnya dalam bagian ini diuraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja, serta hubungan antara program pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang dipilih.

Penyajian indikasi program prioritas pembangunan dan kebutuhan pendanaan, sebagaimana tercantum dalam Tabel VIII.7. berikut:

**Tabel VIII.7.**  
**Indikasi Program Prioritas Pembangunan dan Kebutuhan Pendanaan**  
**Kota Magelang 2011-2015**

Kode	Bidang urusan/ Pogram	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja Kondisi Awal (2009/ 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tar get	Rp	
				Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
<b>MISI KE 1</b>																
<b>Program dan kegiatan pada setiap SKPD</b>																
1	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1. Rasio pemenuhan sarana prasarana perkantoran	75%	80%	15,618,779,000	85%	20,409,722,540	90%	17,171,353,000	95%	15,963,824,000	100%	15,387,988,000	100%	15,387,988,000	Semua SKPD
<b>1.25. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika</b>																
1	Pengembangan komunikasi, informasi, dan media masa	1. Penerapan e-Procurement (LPSE)	0%	30%	123,935,000	75%	132,413,700	80%	135,062,000	90%	137,763,000	100%	140,518,000	100%	140,518,000	Dishubkominfo
		2. Penerapan e-Government yang diukur dari:														
		a. Jumlah SKPD yang menggunakan Sistem Informasi	18 SKPD	20 SKPD		25 SKPD		30 SKPD		46 SKPD		46 SKPD		46 SKPD	Dishubkominfo	
		b. SKPD yang memiliki website	5 SKPD	8 SKPD		16 SKPD		24 SKPD		46 SKPD		46 SKPD		46 SKPD	didukung semua SKPD	
		c. WAN (Wide Area Network) setiap SKPD	10%	13%		25%		50%		60%		75%		75%	Dishubkominfo	
2	Fasilitasi peningkatan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informasi	1. Penggunaan software legal/ OSS di setiap SKPD	10%	20%	59,915,000	50%	61,113,000	100%	62,335,000	100%	63,582,000	100%	64,853,000	100%	64,853,000	Dishubkominfo
<b>1.23 Urusan Wajib Statistik</b>																
1	Pengembangan data/ informasi	Tersedianya dokumen data/ informasi/ statistik daerah:			138,657,000		267,952,000		277,897,000		287,935,000		306,075,000		306,075,000	

Kode	Bidang urusan/ Pogram	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja Kondisi Awal (2009/2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD	
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tar get	Rp		
				Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)	
		- Buku Daerah dalam Angka	ada	ada		ada		ada		ada		ada		ada			Kantor Litbang & Statistik
		- Buku PDRB Kota	ada	ada		ada		ada		ada		ada		ada			Kantor Litbang & Statistik
<b>1.24 Urusan Wajib Kearsipan</b>																	
1	Peningkatan kualitas pelayanan informasi	Persentase SKPD yang melaksanakan arsip baku	35%	50%	80,000,000	55%	204,282,000	60%	221,000,000	65%	240,000,000	70%	253,000,000	100%	253,000,000		Kantor Perpus Daerah, Arsip & Dokumentasi Didukung semua SKPD
		Peningkatan SDM pengelola kearsipan	25%	30%		35%		40%		45%		50%		60%			Kantor Perpus Daerah, Arsip & Dokumentasi Didukung semua SKPD
2	Penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah	Terlaksananya penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah	35%	50%	174,197,000	60%	222,037,000	70%	192,263,000	80%	208,092,000	90%	224,537,000	100%	224,537,000		Kantor Perpus Daerah, Arsip & Dokumentasi Didukung semua SKPD
3	Pemeliharaan rutin berkala sarana & prasarana kearsipan	Terpeliharanya sarana dan prasarana kearsipan	20%	35%	50,000,000	50%	55,000,000	60%	65,000,000	70%	70,000,000	80%	80,000,000	85%	80,000,000		Kantor Perpus Daerah, Arsip & Dokumentasi Didukung semua SKPD
<b>1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>																	
1	Peningkatan pengawasan sistem internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah	Hasil opini BPK untuk Laporan Keuangan	WDP	WDP	668,029,000	WDP	798,080,000	WDP	887,615,000	WDP	966,596,000	WTP	1,048,304,000	WTP	1,048,304,000		Inspektorat Didukung semua SKPD
2	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	Tingkat capaian kinerja pemerintah kota	Sgt baik	Sgt baik	1,698,367,000	Sgt baik	1,995,341,700	Sgt baik	2,100,061,000	Sgt baik	2,335,221,000	Sgt baik	2,514,852,000	Sgt baik	2,514,852,000		Setda Di dikung semua SKPD

Kode	Bidang urusan/ Pogram	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja Kondisi Awal (2009/2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD	
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tar get	Rp		
				Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)	
	dan keuangan																
3	Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Index Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Baik	653,838,000	Baik	691,978,000	Memuaskan	882,572,000	Memuaskan	766,478,000	Memuaskan	808,372,000	Memuaskan	808,372,000	Setda	
		Ketersediaan Standar Operasional Prosedur bidang perizinan dan pelayanan umum	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	Setda
		Penyelesaian aduan masyarakat	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	Setda
4	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Tingkat kompetensi aparatur	88.33%	90%	1,977,734,000	90%	2,089,721,000	91%	2,220,957,000	91%	2,360,624,000	92%	1,683,837,000	92%	1,683,837,000	BKD	
	Pendidikan Kedinasan																
	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur																
5	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Penyederhanaan prosedur pelayanan publik	100%	100%	0	100%	21,934,000	100%	18,627,000	100%	20,490,000	100%	22,539,000	100%	22,539,000	Setda Didukung smeua SKPD	
1.10	<b>Urusan wajib Kependudukan dan Catatan Sipil</b>																
1	Penataan administrasi kependudukan	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	100%	100%	998,967,000	100%	1,368,267,000	100%	1,582,208,000	100%	1,745,254,000	100%	1,913,562,000	100%	1,913,562,000	Dispendukcapil	
		Rasio bayi berakte kelahiran	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Dispendukcapil	
		Rasio pasangan berakte nikah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Dispendukcapil	
		Kepemilikan KTP	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Dispendukcapil	
		Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk (menyusul)	691	733		790		813		847		847		847		847	Dispendukcapil
		Penerapan KTP Nasional berbasis	ada	ada		ada		ada		ada		ada		ada		ada	Dispendukcapil

RPJMD Kota Magelang Tahun 2011-2015

Kode	Bidang urusan/ Pogram	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja Kondisi Awal (2009/2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD	
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tar get	Rp		
				Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)	
		NIK															
1.20 <b>Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>																	
1	Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat pelanggaran etika aparat yg mencakup:			716,449,000		829,746,000		2,589,384,000		954,610,000		999,155,000		999,155,000		BKD
		1. Persentase PNS yang mendapat hukuman disiplin	12.66%	12.66%		10.02%		7.38%		4.74%		2.11%		2%			BKD
		2. Persentase Rata-rata tingkat kehadiran PNS dalam 1 Tahun	95.00%	95.00%		95.25%		95.50%		95.75%		96.00%		96%			BKD
		3. Penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS	20 orang	20 orang		20 orang		20 orang		15 orang		15 orang		15 org			BKD
1.06 <b>Urusan Wajib Perencanaan pembangunan</b>																	
1	Perencanaan Bidang Ekonomi	Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya, serta Fisik Prasarana yang berkualitas (update dan valid)	7 dokumen	7 dokumen	70,000,000	6 dokumen	71,400,000	6 dokumen	72,828,000	6 dokumen	74,284,000	7 dokumen	75,770,000	30 dokumen	75,770,000		Bappeda Didukung semua SKPD
2	Perencanaan Bidang Sosbud				25,000,000		25,500,000		26,010,000		26,530,000		27,060,000		27,060,000		
3	Perencanaan Tata Ruang				251,300,000		256,326,000		261,452,000		266,681,000		272,015,000		272,015,000		
4	Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen RPJPD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.	ada	ada	1,045,128,000	ada	1,024,758,000	ada	1,070,290,000	ada	1,102,492,000	ada	1,140,883,000	ada	1,140,883,000		Bappeda Didukung semua SKPD
		Dokumen RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.	ada	ada		ada		ada		ada		ada		ada			Bappeda Didukung semua SKPD
		Dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota	ada	ada		ada		ada		ada		ada		ada			Bappeda Didukung semua SKPD
		Tingkat Konsistensi Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD	90%	90%		90%		90%		90%		90%		90%			Bappeda Didukung semua SKPD
		Ditetapkannya dokumen perencanaan sesuai peraturan yang	sesuai	sesuai		sesuai		sesuai		sesuai		sesuai		sesuai			Bappeda

Kode	Bidang urusan/ Pogram	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja Kondisi Awal (2009/2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD		
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tar get	Rp			
				Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		
		berlaku (RPJM, RKPD)															Didukung semua SKPD	
1.20	<b>Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>																	
1	Penataan peraturan perundang-undangan	Jumlah peraturan yang mengatur penyelenggaraan pelayanan publik yang dikeluarkan daerah	4	3	50,000,000	3	131,962,000	3	174,462,000	3	86,962,000	3	89,462,000	15	89,462,000		Setda	
		Jumlah dengar pendapat dengan masyarakat dalam penyusunan Perda	4 kali	4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		20 kali			Setda Didukung Setwan	
		Jumlah Perda/ Raperda yang mengakomodasi masukan masyarakat	7 perda, 9 raperda	12 raperda		12 raperda		12 raperda		12 raperda		12 raperda		12 raperda		60 raperda		Setda Didukung Setwan
		Ditetapkannya Perda APBD tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		DPPKD Didukung semua SKPD
		Kesesuaian kelembagaan SKPD dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	sesuai	sesuai		sesuai		sesuai		sesuai		sesuai		sesuai		sesuai		Setda Didukung semua SKPD
<b>MISI 2</b>																		
1.20	<b>Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>																	
1	Perencanaan Pembangunan Daerah	Rasio dana DAK, TP, Dekonsentrasi dan dana hibah serta dana bantuan lainnya terhadap total APBD	12%	14%	92,450,000	15%	80,000,000	16%	90,000,000	17%	90,000,000	18%	100,000,000	18%	100,000,000		Setda	
2	Penataan Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan	Rasio nilai asset daerah yang dikelola	50%	60%	245,280,000	65%	250,185,000	70%	255,189,000	75%	260,293,000	80%	265,498,000	80%	265,498,000		Setda didukung seluruh SKPD	

Kode	Bidang urusan/ Pogram	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja Kondisi Awal (2009/2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD	
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tar get	Rp		
				Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)	
	Tanah																
3	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Asset daerah yang dikelola pihak lain.	12%	17%	3,466,863,000	19%	3,480,000,000	21%	3,480,000,000	23%	3,490,000,000	25%	3,490,000,000	25%	3,490,000,000		setda
		Jumlah kerjasama dengan lembaga keuangan	0	0		1		1		2		3		3			Setda
		Jumlah kerjasama dengan swasta	ada	ada		ada		ada		ada		ada		ada			
		Jumlah dan jenis bank dan cabang perusahaan asuransi	49 bank/BPR 11 asuransi	49 bank/BPR 11 asuransi		50 bank/BPR 11 asuransi		52 bank/BPR 11 asuransi		54 bank/BPR 11 asuransi		55 bank/BPR 11 asuransi		55 bank/BPR 11 asuransi			
4	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah dan macam pajak	7	7	115,422,000	7	178,000,000	7	188,000,000	7	197,000,000	7	207,000,000	7	207,000,000		DPPKD
5	Program Peningkatan Promosi Kerjasama Investasi dan	Bertambahnya laju pertumbuhan investasi	143	186	118,134,500	229	129,947,950	272	142,942,745	315	157,237,020	358	172,960,722	358	172,960,722		KPM
		Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	2	2		2		2		2		3		3			KPM
		Nilai investasi swasta	24,627,613,819	38,500,000,000		39,500,000,000		40,000,000,000		40,500,000,000		41,000,000,000		41,000,000,000			KPM
6	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Jumlah dan jenis kerjasama antar daerah yang berhasil dijalin	0	2		2		2		3		3		3			KPM
<b>1.16 Urusan wajib Penanaman modal daerah</b>																	
1	Program Peningkatan Iklim	Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN	24.627.613.819	24.628.000.	53,368,000	24.629.000.	23,144,000	24.630.000.	25,458,400	24.640.000.	28,004,240	24.650.000.	30,804,664	24.660.000.	30,804,664		KPM Didukung

RPJMD Kota Magelang Tahun 2011-2015

Kode	Bidang urusan/ Pogram	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja Kondisi Awal (2009/2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tar get	Rp	
				Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
	Investasi dan Realisasi Investasi			000		000		000		000		000		000		seluruh SKPD
		Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	143	143		150		160		170		180		199		KPM Didukung seluruh SKPD
		Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	24627613819	38,419,077,558		52,210,541,297		66,002,005,036		79,793,468,775		93,584,932,514		93,584,932,514		KPM Didukung seluruh SKPD
		Lama proses perijinan	5 hari	5 hari		5 hari		5 hari		5 hari		2 hari		2 hari		BP2T
2	Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah	Bertambahnya jumlah pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh	1	1	7,506,000	1	8,256,600	1	9,082,260	2	9,990,486	2	10,989,535	3	10,989,535	KPM Bappeda PU
1.15	<b>Urusan wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah</b>															
1	Program Pengembangan Sistem Pendukung bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah kerja sama PES (Payment for Ecological/ environment Services = imbal jasa lingkungan	0	0		0		0		0		1		1		Diskoperindag
1.14	<b>Urusan wajib tenaga kerja</b>															
1	Peningkatan kesempatan kerja	Prosentase pencari kerja yang ditempatkan	28%	30%	357,078,000	30%	461,000,000	31%	478,000,000	31%	531,000,000	32%	586,000,000	32%	586,000,000	Disnakertrans os
		Rasio daya serap tenaga kerja	6088	12177		13500		15500		16500		17500		195301		KPM Didukung seluruh SKPD
		Sebaran informasi bursa kerja yang terupdate	17 kel	17 kel		17 kel		17 kel		17 kel		17 kel		17 kel		Disnakertrans os
		Jumlah wirausaha baru	20 orang	20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		25 orang		25 orang		Disnakertrans os
2	Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	62.5%	62.8%	16,975,000	62.9%	299,722,000	63.0%	311,000,000	63.1%	269,000,000	63.2%	341,000,000	63,2%	341,000,000	Disnakertrans os

Kode	Bidang urusan/ Pogram	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja Kondisi Awal (2009/2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tar get	Rp	
				Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
		Tingkat pengangguran terbuka	14.95%	14%		13.0%		12%		10.0%		9%		9%		Disnakertrans os
		Calon tenaga kerja yang terdidik (pencari kerja terlatih)	8.9%	8.9%		9.3%		9.7%		10.0%		10.5%		10,5%		Disnakertrans os
		Prosentase Pencapaian UMK terhadap KHL	90,12 %	92.09 %		94.07 %		96.05 %		98.03 %		100%		100%		Disnakertrans os
		Jumlah BLK	0	0		0		0		0		1		1		Disnakertrans os
3	Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Angka perselisihan pengusaha pekerja per tahun	20%	19%	98,450,000	18%	100,419,000	17%	102,427,000	16%	104,475,000	15%	106,565,000	15%	106,565,000	Disnakertrans os
		Jumlah LKS Bipartit	33	33		33		33		33		33		33		Disnakertrans os
		jumlah lembaga penyelenggara pelatihan kerja berperan aktif dalam peningkatan kualitas produktivitas tenaga kerja.	13	13		13		13		14		15		15		Disnakertrans os
		Prosentase penurunan kasus-kasus ketenagakerjaan di Kota Magelang, baik kasus perselisihan hubungan industrial maupun kasus TKI	3%	2%		2%		2%		2%		2%		2%		Disnakertrans os
		Prosentase perusahaan yang telah menerapkan norma keselamatan dan perlindungan ketenagakerjaan	0,75%	1.87%		2.33%		2.80%		3.26%		3.73%		3,73%		Disnakertrans os
<b>MISI KE 3</b>																
1.15	<b>Urusan wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah</b>															
1	Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	Jumlah bidang usaha Sektor riil yang berkembang	1045	1050	43,420,000	1100	168,978,000	1200	165,828,000	1300	248,625,000	1400	268,602,000	1500	268,602,000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan  SKPD Pendukung: Setda

RPJMD Kota Magelang Tahun 2011-2015

Kode	Bidang urusan/ Pogram	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja Kondisi Awal (2009/2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD	
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tar get	Rp		
				Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)	
																	Bappeda,DPP, PM, BP2T,
2	Program pengembangan sistem pendukung bagi UMKM	Jumlah pelaku usaha ekonomi kerakyatan menerima akses permodalan	710	800	33,466,000	900	61,700,000	1000	51,250,000	1150	73,700,000	1300	71,300,000	1500	71,300,000		Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan  SKPD Pendukung: Setda Bappeda,DPP, PM, BP2T,
3	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	Jumlah UMKM yang sudah memanfaatkan teknologi dan terpenuhi sarana prasarana	150	150	136,291,000	175	253,879,000	200	195,905,000	250	289,486,000	300	347,693,000	350	347,693,000		Dinkopperinda g  Didukung: Setda, DPPKD, Bappeda
		Jumlah UMKMK, Jumlah UKM non BPR/LKM UKM, Usaha mikro dan kecil	710	750		800		850		900		950		1000			Dinkopperinda g  Didukung: Setda, DPPKD, Bappeda
		Jumlah UMKMK yang memanfaatkan kredit	310	320		350		360		380		400		400			Dinkopperinda g Didukung: Setda, DPPKD, Bappeda
		Persentase UMKMK yang produktif	30%	30%		40%		50%		60%		70%		100%			Dinkopperinda g  Didukung: Setda, DPPKD, Bappeda

Kode	Bidang urusan/ Pogram	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja Kondisi Awal (2009/2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tar get	Rp	
				Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
4	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Jumlah koperasi	214	214	40,269,000	216	48,323,000	216	57,997,000	218	69,585,000	220	83,502,000	220	83,502,000	Dinkopperinda g Didukung: Setda, DPPKD, Bappeda
		Prosentase Koperasi Aktif	67%	71%		72%		73%		74%		75%		75%		Dinkopperinda g Didukung: Setda, DPPKD, Bappeda
<b>2.06 Urusan pilihan perdagangan</b>																
1	Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Jumlah sektor informal / PKL yang tertata	100	100	545,066,000	150	555,967,000	101	567,086,000	151	578,427,000	310	589,996,000	310	589,996,000	DPP didukung oleh Diskoperindag, Setda, DPU, Bappeda
		Jumlah kelembagaan PKL yang tertib administrasi	4	5		10		15		20		26		26		DPP didukung oleh Diskoperindag, Setda, DPU, Bappeda
2	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Jumlah promosi UMKMK	2	4	168,219,000	7	1,699,331,000	10	1,699,331,000	13	1,699,331,000	16	1,699,331,000	16	1,699,331,000	Dinkopperinda g Didukung: Setda, DPPKD, Bappeda
		Jumlah kontak dagang dan temu usaha.	6	6		11		16		20		24		24		Dinkopperinda g Didukung: Setda, DPPKD,

Kode	Bidang urusan/ Pogram	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja Kondisi Awal (2009/ 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD	
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tar get	Rp		
				Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)	
																	Bappeda
		Jumlah industri rumah tangga	1770	1770		1800		1800		2000		2150		2150			Dinkopperinda g  Didukung: Setda, DPPKD, Bappeda
		Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	3,33%	3,33%		4%		4,5%		5%		5,5%		5,5%			Dinkopperinda g  Didukung: Setda, DPPKD, Bappeda
<b>2.01 Urusan pilihan Pertanian</b>																	
1	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Prosentase konservasi sumberdaya lahan dan sumber daya hayati	3%	3,9 %	0	5%	20,000,000	7%	30,000,000	9%	35,000,000	10%	40,000,000	10%	40,000,000		Dinas Pertanian
		Prosentase pemanfaatan lahan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			Dinas Pertanian
		Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	2,91%	2,91%		2,91%		2,91%		2,91%		2,91%		2,91%			Dinas pertanian
		Jumlah jenis bidang usaha agribisnis	6	7 Jenis		8 Jenis		9 Jenis		10 Jenis		11 Jenis		11			Dinas Pertanian
		Jumlah penggunaan benih padi bermutu	3000	5000 kg		5000 kg		5500 kg		5500 kg		6000 kg		6000			Dinas Pertanian
2	Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/perkebunan	Tersedianya database produk pangan lokal	Tidak ada	Tidak ada	250,250,000	ada	354,000,000	ada	440,500,000	ada	353,300,000	ada	598,606,000	ada	598,606,000		BPMPKB Didukung Dinas Pertanian, Diskoperindag
		Adanya regulasi ketahanan pangan	ada	ada		ada		ada		ada		ada		ada			BPMPKB Didukung

Kode	Bidang urusan/ Pogram	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja Kondisi Awal (2009/2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD	
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tar get	Rp		
				Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)	
																	Dinas Pertanian, SETDA
		Ketersediaan pangan utama	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	BPMPKB Didukung oleh Dinas Pertanian, SETDA
		Cakupan beras bersubsidi pada KK miskin (sesuaikan bab 9 angka kemiskinan)	6.961 RTS-PM	6.961 RTS-PM		6.000 RTS-PM		5.500 RTS-PM		5.000 RTS-PM		4.598 RTS-PM		4.598 RTS-PM		4.598 RTS-PM	BPMPKB Didukung oleh Dinas Pertanian, SETDA
		Tingkat kerawanan pangan dan gizi	Tidak ada	Tidak ada		Tidak ada		Tidak ada		Tidak ada		Tidak ada		Tidak ada		Tidak ada	BPMPKB Didukung oleh Dinas Pertanian, SETDA
		Tingkat diversifikasi konsumsi Pangan yang beragam bergizi, seimbang dan aman	87,6	89%		90%		90%		93,7%		93,7%		93,7%		93,7%	BPMPKB Didukung oleh Dinas Pertanian, Disk operindag
3	Peningkatan kesejahteraan Petani	1. Rasio petani terlatih	65%	70%	21,000,000	70%	18,500,000	75%	22,000,000	75%	25,500,000	80%	30,000,000	80%	30,000,000		Dinas Pertanian
		a. Pertanian															
		b. Peternakan	50%	60%		65%		65%		70%		75%		75%		75%	
		c. Perikanan	60%	70%		70%		75%		75%		80%		80%		80%	
		2. Penguatan kelembagaan petani:															Dinas Pertanian
		a. Pertanian	16klp	16klp		16klp		16klp		16klp		16klp		16klp		16 klp	
		b. Peternakan	2 klp	2 klp		4 klp		6 klp		8 klp		10 klp		10 klp		10 klp	
		c. Perikanan	17 klp	17 klp		17 klp		17 klp		17 klp		17 klp		17 klp		17 klp	

Kode	Bidang urusan/ Pogram	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja Kondisi Awal (2009/2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD	
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tar get	Rp		
				Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)	
4	Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Jumlah tempat pengolahan pasca panen: Pertanian	1	1	37,000,000	3	46,000,000	3	58,000,000	4	70,000,000	4	85,000,000	5	85,000,000	Dinas pertanian	
5	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Jumlah tempat pengolahan pasca panen: Peternakan	1	1	6,000,000	1	28,000,000	2	36,000,000	2	44,000,000	2	52,000,000	3	52,000,000	Dinas pertanian	
6	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Jumlah tempat pengolahan pasca panen: Perikanan	3	3	709,993,000	3	6,000,000	3	8,000,000	3	10,000,000	3	12,000,000	3	12,000,000	Dinas pertanian	
7	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian perkebunan	jumlah serangan OPT yang dapat diatasi	100%	100%	20,900,000	100%	45,000,000	100%	57,000,000	100%	75,000,000	100%	95,000,000	100%	95,000,000	Dinas Pertanian	
		jumlah penggunaan teknologi tepat guna( Panca usaha tani )	3 paket	5 Paket		5 Paket		5 Paket		5 Paket		5 Paket		5 paket		5 paket	Dinas Pertanian
8	Peningkatan produksi peternakan	Jumlah populasi unggas	60637	63668	17,500,000	66851	18,000,000	70034	18,500,000	73217	19,000,000	76401	19,500,000	76401	19,500,000	Dinas Pertanian	
		Domba / kambing	479	502		527		552		577		603		603			
		sapi	176	185		194		203		212		222		222			
		Jumlah produksi peternakan: Daging (kg)	3699000	3699000		3775409		3851818		3928227		4004635		4004635			Dinas pertanian
		Telur (kg)	350170	350170		357388		364606		371824		379042		379042			

Kode	Bidang urusan/ Pogram	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja Kondisi Awal (2009/2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD	
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tar get	Rp		
				Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)	
		Susu (lt)	411752	41175 2		42023 2		42871 2		43719 2		44567 2		44567 2			
		Produksi perikanan kelompok petani	88 ton/tahun	103 ton		161 ton		219 ton		277 ton		335 ton		335 ton/tahun			
		Jumlah ternak yg diperiksa kesehatannya	5.289 Ekor	5735 Ekor		6197 ekor		6659 Ekor		7121 Ekor		7.582 Ekor		7.582 Ekor			Dinas Pertanian
<b>2.02 Urusan pilihan kehutanan</b>																	
1	Program Pemanfaatan Potensi Sumber daya hutan	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	20 ha.	20 ha.	0	20 ha.	10,000,000	23 ha	20,000,000	23 ha	30,000,000	25 ha.	40,000,000	25 ha.	40,000,000		Dinas Pertanian
		Konservasi kawasan hutan	71 ha	71 ha		71 ha		71 ha		71 ha		71 ha		71 ha			Dinas Pertanian
		Kerusakan kawasan hutan															
<b>MISI 4</b>																	
<b>1.05 Urusan wajib Penataan Ruang</b>																	
1	Program Perencanaan Tata Ruang	Tersediannya dokumen RTRW dan Perda RTRW 2010 -2030, RDTRK dan Perda RDTRK 2010 -2020, RTH, dan RTBL Kawasan Strategis Lingkungan Hidup (Gunung Tidar)	0%	0%	0	25%	100,000,000	25%	120,000,000	50%	140,000,000	70%	160,000,000	70%	160,000,000		Bappeda
		tersedianya sarana informasi Rencana tata Ruang Wilayah Kota Magelang kepada masyarakat	30%	35%		50%		60%		80%		100%		100%			Bappeda
		Jumlah Ijin Lokasi yang sesuai dengan peruntukan ruang	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			DKPT
<b>1.03 Urusan wajib Pekerjaan Umum</b>																	
1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Proporsi Panjang Jalan Kota Magelang dengan kondisi baik	60%	75%	10,372,02 2,000	75%	6,717,000,00 0	80%	4,870,000,00 0	85%	4,975,000,00 0	90%	5,075,000,00 0	90%	5,075,000,00 0		DPU

Kode	Bidang urusan/ Pogram	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja Kondisi Awal (2009/2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tar get	Rp	
				Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
		Rasio Pasar Tradisional dalam kondisi baik	90%	90%		90%		90%		90%		90%		90%		DPP
2	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh sebanyak sebanyak 4 Kawasan yaitu GOR Samapta, Sidotopo, Sentra Ekonomi Lembah Tidar,dan Alun-alun	25%	50%	8,330,223,000	55%	39,000,000,000	60%	36,500,000,000	65%	9,000,000,000	75%	9,000,000,000	75%	9,000,000,000	DPU
<b>1.04 Urusan wajib perumahan</b>																
1	Program Pengembangan Perumahan	Rasio luas lingkungan permukiman kumuh	49%	48%	3,070,463,000	47%	2,385,000,000	46%	2,449,100,000	45%	2,425,220,000	44%	2,491,464,000	44%	2,491,464,000	DPU
		Rasio jumlah rumah layak huni	80%	81%		82%		83%		84%		85%		85%		DPU
		Tersedianya Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) Bidang Permukiman (non-fisik)	Belum ada	Belum ada		Belum ada		Belum ada		Belum ada		Belum ada		Belum ada	ada	
<b>1.08 Urusan wajib Lingkungan Hidup</b>																
1	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Prosentase penanganan sampah di TPSA (pengolahan sanitary landfill)	30%	100%	1,319,211,000	100%	4,150,466,700	100%	10,170,000,000	100%	9,836,930,387	100%	2,502,555,426	100%	2,502,555,426	DKPT
2	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	13%	15%	807,413,000	15%	883,000,000	15%	1,303,500,000	20%	1,059,500,000	20%	1,297,500,000	20%	1,297,500,000	DKPT
		Pengembangan RTH Publik Pusat Kota (Kaw alon- alon )	50%	60%		70%		80%		90%		100%		100%		DKPT
3	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	30%	35%	468,289,000	45%	219,085,000	55%	240,993,500	65%	249,453,600	75%	274,398,960	75%	274,398,960	KLH
		Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	20%	20%		20%		20%		15%		15%		15%		DKPT

Kode	Bidang urusan/ Pogram	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja Kondisi Awal (2009/2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tar get	Rp	
				Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
4	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Rasio ketersediaan IPAL	18,75%	23%	481,750,000	25%	739,741,700	26%	813,715,870	27%	895,087,457	30%	984,596,204	30%	984,596,204	KLH
5	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Tersedianya Dokumen SLHD	ada	ada	46,100,000	ada	149,350,000	ada	28,435,000	ada	144,413,500	ada	34,406,350	ada	34,406,350	KLH
		Penegakan hukum lingkungan hidup	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
<b>1.07 Wajib Perhubungan</b>																
1	Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	Jumlah sarana prasarana lalu lintas jalan raya (APPIL)	75%	75%	941,600,000	75%	941,600,000	80%	941,600,000	80%	941,600,000	85%	941,600,000	85%	941,600,000	Dishubkominfo
2	Pembangunan sarana dan Prasarana Perhubungan	Tersedianya Sarana dan Prasarana serta fasilitas Terminal tipe A dg kondisi yg baik di Kota Magelang	50%	75%	288,902,000	75%	288,902,000	75%	288,902,000	80%	288,902,000	80%	288,902,000	80%	288,902,000	Dishubkominfo
		Prasarana angkutan darat berupa terminal angkutan barang dengan kondisi baik	50%	70%		70%		70%		75%		75%		75%		Dishubkominfo
		Jumlah Sub terminal ( TERMINAL Type c ) yang tertata	50%	60%		60%		65%		65%		70%		70%		Dishubkominfo
		Rasio prasarana parkir dengan kondisi baik	70%	80%		80%		85%		85%		90%		90%		Dishubkominfo
		Tingkat pelayanan parkir di tepi jalan umum	60%	75%		75%		80%		85%		90%		90%		Dishubkominfo
		Jumlah tempat-tempat pemberhentian Angkutan Umum (Halte/Sub terminal yang ada di Kota Magelang)	8	10 buah		10 buah		13 buah		13 buah		15 buah		15		Dishubkominfo
3	Peningkatan kelaikan pengoperasionalan	Jumlah uji KIR angkutan umum dan angkutan barang di Kota Magelang	2218KB WU	2218K BWU	89,398,000	2218K BWU	89,398,000	2218K BWU	89,398,000	2218K BWU	89,398,000	2218K BWU	89,398,000	2218K BWU	89,398,000	Dishubkominfo

RPJMD Kota Magelang Tahun 2011-2015

Kode	Bidang urusan/ Pogram	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja Kondisi Awal (2009/2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD	
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tar get	Rp		
				Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)	
	kendaraan bermotor																
		Rasio kepemilikan KIR angkutan umum	10%	10%		10%		10%		5%		5%		5%			Dishubkominfo
		Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	30 menit	30 menit		30 menit		30 menit		30 menit		30 menit		30 mnt			Dishubkominfo
		Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	36000	36000		36000		36000		36000		36000		36000			Dishubkominfo
5	Peningkatan pelayanan angkutan	Rasio ijin trayek	0,82%	0,82%	229,590,000	0,82%	229,590,000	0,82%	229,590,000	0,82%	229,590,000	0,82%	229,590,000	0,82%	229,590,000		Dishubkominfo
		Jumlah arus penumpang angkutan umum	179976	179976		177000		175000		173000		170000		170000			Dishubkominfo
		Jumlah orang/barang yang melalui terminal per tahun	179976	179976		177000		175000		173000		170000		170000			Dishubkominfo
<b>1.25 Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika</b>																	
1	Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Jumlah jaringan komunikasi operator dengan kondisi baik	8	8	181,819,000	8	181,819,000	8	181,819,000	8	181,819,000	8	181,819,000	8	181,819,000		Dishubkominfo
		Jumlah sarana penyedia informasi melalui media informasi	11	12		12		12		13		13		13			Dishubkominfo
		Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	7	7		10		12		14		17		17			Dishubkominfo
		Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	0,098%	0,098%		0,088%		0,078%		0,068%		0,059%		0,59%			Dishubkominfo
		Tersedianya / Jumlah Hot Spot pada ruang terbuka publik di Kota Magelang	1 titik	1 titik		2 titik		3 titik		4 titik		5 titik		5 titik			Dishubkominfo
<b>2.04 Urusan pilihan pariwisata</b>																	
1	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan wisata	983,978	984,060	237,300,000	1,082,460	445,000,000	1,094,761	465,000,000	1,107,063	493,500,000	1,119,365	501,000,000	1,119,365	501,000,000		Disbudparpora

Kode	Bidang urusan/ Pogram	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja Kondisi Awal (2009/2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tar get	Rp	
				Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	7,8	7.9		7.9		7.9		8.0		8.0		8,0		Disporabudpar
1.17	<b>Urusan wajib kebudayaan</b>															
1	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah kelompok seni dan budaya yang ada di seluruh Kota Magelang	160	160	210,286,000	161	521,125,000	163	570,015,000	164	611,973,000	165	672,842,600	165	672,842,600	Disporabudpar
		Jumlah gedung kesenian	0	0		0		1		2		2		2		Disporabudpar
2	Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah festival seni dan budaya.	3	3	130,000,000	3	334,000,000	4	400,000,000	4	414,000,000	5	477,000,000	5	477,000,000	Disporabudpar
		Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	36	36		36		36		36		36		36		Disporabudpar
1.22	<b>Urusan wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>															
1	Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	4	4	550,711,000	4	674,112,000	4	715,037,000	4	753,817,000	4	804,128,000	4	804,128,000	BPMPKB
		LPM berprestasi	11%	16%		21%		26%		31%		31%		17,65		BPMPKB
		Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	50%	50%		50%		55%		60%		60%		60%		BPMPKB
		pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		BPMPKB
		Jumlah LKM yang dapat melaksanakan program dengan baik	17	17		17		17		17		17		17		BPMPKB
2	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa;	Kelurahan yang menerapkan TTG	23%	25%	19,500,000	27%	113,000,000	30%	124,700,000	35%	136,500,000	40%	129,500,000	40%	129,500,000	BPMPKB
3	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Jumlah LKK dan lembaga keuangan masyarakat yang sehat dan berkualitas	41%	45%	17,000,000	50%	38,000,000	55%	47,000,000	65%	56,000,000	70%	65,000,000	70%	65,000,000	BPMPKB didukung oleh: SETDA, DISKOPERINDAG, KECAMATAN, KELURAHAN

Kode	Bidang urusan/ Pogram	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja Kondisi Awal (2009/2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tar get	Rp	
				Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
<b>1.06 Urusan wajib perencanaan pembangunan</b>																
1	Perencanaan Sosial budaya	Jumlah Krenova yang terdata	11	11	63,480,000	12	85,000,000	13	95,000,000	14	105,000,000	15	110,000,000	15	110,000,000	KANTOR LITBANG DAN STATISTIK
2	Perencanaan Sosial Budaya	Jumlah rakor dan monev TKPK	4 kali	4 kali		4kali		5 kali		5 kali		6 kali		6 kali		Bappeda
<b>1.12 Urusan wajib Kesehatan</b>																
1	Program Perbaikan gizi masyarakat	Jumlah anak sekolah yang mendapatkan PMTAS	550	250	100,000,000	300	25,000,000	350	30,000,000	400	38,100,000	450	45,000,000	450	45,000,000	BMPKKB DINAS Didukung oleh: PENDIDIKAN
		Posyandu aktif	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		BMPKKB Didukung: KECAMATAN & KELURAHAN
		Jumlah posyandu yang berprestasi	0.52%	0.52%		1.04%		1.56%		2.08%		2.58%		2,58%		BPMKB Didukung:KECAM ATAN & KELURAHAN
<b>1.11 Wajib pemberdayaan perempuan</b>																
1	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rasio KDRT	0,10%( ganti) angka	0.12%	55,200,000	0.13%	62,500,000	0.14%	98,000,000	0.15%	99,500,000	0.16%	109,500,000	0,16%	109,500,000	BMPKKB Didukung: SETDA, KECAMATAN, KELURAHAN
		Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	90 %	91%		92%		93%		94%		95%		95%		BMPKKB Didukung: SETDA, KECAMATAN, KELURAHAN
2	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	42,27%	42.83 %	157,734,000	49.63 %	243,538,000	56.43 %	256,764,000	63.23 %	281,673,000	70.03 %	294,028,000	70,2%	294,028,000	BMPKKB Didukung: SETDA, KECAMATAN, KELURAHAN

Kode	Bidang urusan/ Pogram	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja Kondisi Awal (2009/2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tar get	Rp	
				Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
		Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	30%	35%		40%		50%		55%		60%		60%		BPMPKB Didukung: SETDA, KECAMATAN, KELURAHAN
		rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	23,53%	35.29 %		38.23 %		41.17 %		44.11 %		47.06 %		47,06		BPMPKB Didukung: SETDA, KECAMATAN, KELURAHAN
		Partisipasi angkatan kerja perempuan	68	70		72		74		76		77		77		BPMPKB Didukung: SETDA, KECAMATAN, KELURAHAN
		PKK Aktif	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		BPMPKB
		Persentase tenaga kerja di bawah umur														BPMKB
<b>MISI 5</b>																
<b>1.02 Urusan wajib kesehatan</b>																
1	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani.	100%	100%	0	100%	73,100,000	100%	81,500,000	100%	97,200,000	100%	103,000,000	100%	103,000,000	DKK
		Angka kelangsungan hidup bayi	995,19/1000 KH	995,19/1000 KH		995,19/1000 KH		995,19/1000 KH		995,19/1000 KH		995,19/1000 KH		995,19/1000 KH		DKK
2	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	Angka kelangsungan hidup bayi	995,19/1000 KH	995,19/1000 KH	13,000,000	995,19/1000 KH	13,000,000	995,19/1000 KH	13,000,000	995,19/1000 KH	13,000,000	995,19/1000 KH	13,000,000	995,19/1000 KH	13,000,000	DKK
3	Program	rasio dokter persatuan penduduk	0,796	0.872	12,250,00	0.903	12,030,000,0	0.934	40,000,000	0.965	42,500,000	0.995	17,500,000	0,995	17,500,000	DKK

**RPJMD Kota Magelang Tahun 2011-2015**

Kode	Bidang urusan/ Pogram	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja Kondisi Awal (2009/2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD	
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tar get	Rp		
				Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)	
	Standarisasi Pelayanan Kesehatan				0,000		00										
		rasio tenaga medis persatuan penduduk	1615	1.722		1.776		1.829		1.883		1.936		1936			DKK
4	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan rawat jalan terhadap jumlah penduduk	28%	15%	5,921,879,000	15%	4,136,844,000	15%	4,234,859,000	15%	4,338,845,500	15%	4,584,210,650	15%	4,584,210,650		DKK
		Cakupan rawat inap terhadap jumlah penduduk	25%	1.50%		1.50%		1.50%		1.50%		1.50%		1,50%			DKK
		Cakupan Puskesmas	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			DKK
		Cakupan Pembantu Puskesmas (PUSTU)	53%	60%		65%		70%		75%		80%		80%			DKK
		Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	16%	17%		17%		17%		18%		18%		18%			DKK
		rasio Rumah sakit persatuan penduduk	6.65%	7%		7%		7%		8%		8%		8%			DKK
		Terwujudnya RSU Tidar terakreditasi 16 pelayanan yang menjadi rujukan bagi daerah sekitar	75%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			DKK
5	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Angka usia harapan hidup	70,17	70.45	98,270,000	70.57	147,706,000	70.69	167,696,000	70.81	184,150,000	70.93	201,320,000	70,93	201,320,000		DKK
		Jumlah puskesmas santun usila	2	2		3		4		5		6		6			DKK
6	Perbaikan gizi masyarakat	Angka usia harapan hidup	70,17	70.45	81,900,000	70.57	98,880,000	70.69	106,900,000	70.81	120,900,000	70.93	140,000,000	70.93	140,000,000		DKK
7	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Persentase balita gizi buruk	1,30%	1%	103,957,000	1%	191,907,000	1%	219,051,000	1%	235,577,000	1%	252,907,000	1%	252,907,000		DKK
8	Program Pelayanan	Cakupan Jaminan pemeliharaan kesehatan Keluarga Miskin dan	100%	100%	3,708,000,000	100%	1,648,000,000	100%	1,648,000,000	100%	1,008,000,000	100%	1,008,000,000	100%	1,008,000,000		DKK

RPJMD Kota Magelang Tahun 2011-2015

Kode	Bidang urusan/ Pogram	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja Kondisi Awal (2009/2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD	
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tar get	Rp		
				Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)	
	Kesehatan Penduduk Miskin	Masyarakat Rentan															
		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin.	21,27 %	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	DKK
9	Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (HIV-AIDS, Malaria)	85%	85%	343,585,000	85%	405,920,000	90%	510,600,000	95%	633,500,000	100%	741,400,000	100%	741,400,000	DKK	
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		DKK	
		Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		DKK	
10	Obat dan perbekalan kesehatan	Prosentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan	97,47 %	100%	390,500,000	100%	2,201,500,000	100%	2,432,500,000	100%	2,761,000,000	100%	2,764,000,000	100%	2,764,000,000	DKK	
11	Pengawasan obat dan makanan	Prosentase jumlah obat dan makanan yang mendapatkan uji keamanan sehingga aman dikonsumsi masyarakat	80%	80%	59,900,000	80%	85,250,000	80%	92,000,000	80%	109,000,000	80%	119,000,000	80%	119,000,000	RSU	
12	Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	Prosentase penurunan angka korban keracunan obat dan makanan.	0	0	25,500,000	0	32,000,000	0	40,000,000	0	42,000,000	0	55,000,000	0	55,000,000	RSU	
13	Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Cakupan Rumah tangga sehat	97,4%	97.50 %	8,604,000	97.50 %	729,798,000	97.75 %	731,250,000	97.75 %	782,700,000	98%	734,000,000	98%	734,000,000	DKK	
		Cakupan Kelurahan Siaga Aktif, Strata 3	17%	35%		45%		60%		75%		100%		100%		DKK	
14	Pengembangan Lingkungan Sehat	Penyediaan air bersih dan sanitasi dasar	97,5%	97.5%	92,934,000	97.5%	142,339,000	97.5%	164,400,000	97.5%	167,400,000	97.5%	187,900,000	97.5%	187,900,000	DKK	
		Pengawasan lingkungan: Industri Rumah Tangga	50%	51%		52%		53%		54%		55%		55%		DKK	

Kode	Bidang urusan/ Pogram	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja Kondisi Awal (2009/2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD	
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tar get	Rp		
				Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)	
		Rasio Pengembangan wilayah sehat (Permukiman, Obyek Wisata, Industri Rumah Tangga)	80%	80.15 %		80.20 %		80.25 %		80.30 %		80.35 %		80,35 %			DKK
<b>1.12 Urusan Wajib keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera</b>																	
1	Program Keluarga Berencana	Rata-rata jumlah anak per keluarga	0,6	0,6	846,380,000	0,6	40,000,000	0,5	48,000,000	0,5	54,000,000	0,5	60,000,000	0,5	60,000,000		BPMPKB
		Rasio akseptor KB	75%	76%		77%		78%		79%		80%		100%			BPMPKB
		Cakupan peserta KB aktif	75%	76%		77%		78%		79%		80%		90%			BPMPKB
		Peserta KB Keluarga Pra Sejahtera dan keluarga Sejahtera I	55%	60%		62%		64%		66%		68%		68%			BPMPKB
<b>1.13 Wajib sosial</b>																	
1	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	jumlah sarana sosial (panti jompo, panti asuhan, panti rehabilitasi)	8	8	18,500,000	8	18,500,000	8	18,500,000	8	18,500,000	9	18,500,000	9	18,500,000		Disnakertransos
2	Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Prosentase penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial	5,05%	5,05 %		6.15%	282,562,000	8.45%	218,568,000	10.75 %	250,159,800	12.92 %	281,195,700	12,92 %	281,195,700		Disnakertransos
		PMKS yang memperoleh bantuan sosial	5,05%	5,05 %		6.15%		8.45%		10.75 %		12.92 %		12.92 %			Disnakertransos
<b>1.01 Wajib Pendidikan</b>																	
1	Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	81,54%	82%	307,242,000	84%	801,650,000	86%	916,275,000	88%	1,006,587,000	90%	1,071,440,000	90%	1,071,440,000		DINAS PENDIDIKAN
2	Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	116,82 %	116,8 5%	16,599,473,000	116,8 8%	10,140,000,000	116,9 0%	10,450,000,000	116,9 2%	10,800,000,000	116,9 5%	11,180,000,000	116,9 5%	11,180,000,000		DINAS PENDIDIKAN
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	142,26	142,3 0		142,3 3		142,3 5		142,3 7		142,4 0		142,4 0			DINAS PENDIDIKAN
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	133,84	133,8 6		133,8 8		133,9 0		133,9 3		133,9 5		133,9 5			DINAS PENDIDIKAN

Kode	Bidang urusan/ Pogram	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja Kondisi Awal (2009/2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tar get	Rp	
				Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	182,49	182,52		182,55		182,58		182,60		182,63		182,63		DINAS PENDIDIKAN
		Angka rata-rata lama sekolah SD/MI	6	6		6		6		6		6		6		DINAS PENDIDIKAN
		Angka rata-rata lama sekolah SMP/MTs	3	3		3		3		3		3		3		DINAS PENDIDIKAN
		Angka pendidikan yang ditamatkan SD/MI	1,90	1,90		1,90		1,90		1,90		1,90		1,90		DINAS PENDIDIKAN
		Angka pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs	2,37	2,37		2,37		2,37		2,37		2,37		2,37		DINAS PENDIDIKAN
		Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah	1 : 88	1:85		1 :82		1:78		1: 74		1 : 70		1 :70		DINAS PENDIDIKAN
		Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	133,7%	134%		134,3%		134,5%		134,8%		135%		135%		DINAS PENDIDIKAN
3	Program Pendidikan Menengah	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket B	108,73	108,75%	1,674,025,000	108,77	274,000,000	108,80	276,000,000	108,83	277,000,000	108,85	278,000,000	108,85	278,000,000	DINAS PENDIDIKAN
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket B	80,58	80,60		80,63		80,65		80,67		80,70		80,70		DINAS PENDIDIKAN
		Angka rata-rata lama sekolah SMA/SMK/MA	3	3		3		3		3		3		3		DINAS PENDIDIKAN
		Angka pendidikan yang ditamatkan	3,96	3,79		3,62		3,45		3,28		3,11		3,11		DINAS PENDIDIKAN
		Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK/MA	80,58%	83%		86%		88,5%		92%		94%		94%		DINAS PENDIDIKAN
		Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		DINAS PENDIDIKAN
		Rasio guru terhadap murid	1:10	1:10		1:10		1:10		1:10		1:10		1:10		DINAS PENDIDIKAN
		Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	1;10:31	1;10:31		1;10:31		1;10:31		1;10:31		1;10:31		1;10:31		DINAS PENDIDIKAN
		Penduduk yang berusia >15 Tahun	88164	87964		87764		87564		87364		87164		87164		DINAS

Kode	Bidang urusan/ Pogram	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja Kondisi Awal (2009/2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD	
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tar get	Rp		
				Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)	
		melek huruf (tidak buta aksara)															PENDIDIKAN
		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMK/SMA/MA	57,85%	65%		70%		75%		80%		85%		85%			DINAS PENDIDIKAN
4	Pendidikan non formal	Angka melek huruf	95%	95%	354,432,000	95%	304,000,000	96%	308,500,000	96%	313,000,000	97%	318,000,000	97%	318,000,000		DINAS PENDIDIKAN
		Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket A	90%	93%		94%		95%		96%		97%		97%			DINAS PENDIDIKAN
		Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket B	90%	91%		92%		93%		94%		95%		97%			DINAS PENDIDIKAN
		Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket C	88.15%	82%		84%		86%		88%		90%		90%			DINAS PENDIDIKAN
		usia dewasa yang belum bersekolah terlayani pendidikan kesetaraan	48%	52%		54%		56%		58%		60%		60%			DINAS PENDIDIKAN
		persentase pengangguran usia 15-44 th memperoleh layanan pendidikan Kecakapan Hidup	4%	5%		6%		7%		8%		9%		9%			DINAS PENDIDIKAN
		persentase lembaga PNF terakreditasi c.	34%	44%		55%		65%		75%		3%		3%			DINAS PENDIDIKAN
		Jumlah model layanan PNF Unggulan	9%	18%		26%		34%		42%		50%		50%			DINAS PENDIDIKAN
5	Pendidikan luar biasa	pendidikan khusus terakreditasi	30%	60%		65%		70%		75%		80%		50%			DINAS PENDIDIKAN
6	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidik yang berkualifikasi dan Prasarana pada pendidikan khusus	75%	80%	940,853,000	85%	861,000,000	90%	871,000,000	95%	881,000,000	100%	890,000,000	100%	890,000,000		DINAS PENDIDIKAN
		Rasio guru / murid	1:14	1:15		1:20		1:25		1:25		1:30		1:32			DINAS PENDIDIKAN

Kode	Bidang urusan/ Pogram	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja Kondisi Awal (2009/2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tar get	Rp	
				Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
		Rasio guru / murid per kelas rata-rata	1:16	1:20		1:23		1:25		1:27		1:30		1;32		DINAS PENDIDIKAN
		Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	72%	78%		85%		90%		95%		100%		100%		DINAS PENDIDIKAN
		Pendidik yang berkualifikasi dan Prasarana pada pendidikan khusus terpenuhi	75%	75%		75%		100%		100%		100%		100%		DINAS PENDIDIKAN
		Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO	6	6		7		8		9		10		10		DINAS PENDIDIKAN
7	Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	32.156	33,936	459,194,000	35,327	1,038,624,000	36,718	1,078,884,000	38,109	1,228,268,000	39,500	1,414,184,000	39500	1,414,184,000	KANTOR PERPUSTAKAAN
		Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	49.804	50,834		52,834		54,834		56,834		58,834		58834		KANTOR PERPUSTAKAAN
8	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Prosentase sekolah melaksanakan kurikulum Bahasa Jawa	100%	100%	8,728,917,000	100%	12,900,000,000	100%	12,910,000,000	100%	12,960,000,000	100%	13,010,000,000	100%	13,010,000,000	DINAS PENDIDIKAN
<b>1.18 Urusan wajib Pemuda dan Olah Raga</b>																
1	Program pengembangan dan Keserasian kebijakan Pemuda	Jumlah kegiatan kepemudaan	16	7	0	10	30,000,000	13	34,000,000	16	36,000,000	20	40,000,000	20	40,000,000	DISPORABUDPAR
2	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah organisasi pemuda	28	28	235,928,000	28	432,100,000	29	483,600,000	29	521,000,000	30	569,500,000	30	569,500,000	DISPORABUDPAR
3	Pembinaan dan pemsyarakatan olahraga	i. Jumlah klub olah raga	156	156	545,100,000	162	1,135,500,000	168	1,275,750,000	174	1,338,000,000	180	1,317,500,000	180	1,317,500,000	DISPORABUDPAR
		Jumlah organisasi olah raga	30	30		31		32		33		35		35		DISPORABUDPAR

Kode	Bidang urusan/ Pogram	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja Kondisi Awal (2009/2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tar get	Rp	
				Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
		jumlah even/ kegiatan olah raga yang diselenggarakan	21	13		17		21		25		30		30		DISPORABUDPAR
		Jumlah prestasi olah raga dalam even Nasional	17	25		31		37		43		50		50		DISPORABUDPAR
	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda (baru)															
4	Peningkatan Sarana Dan Prasarana olahraga	Jumlah gedung olah raga	27	27	124,550,000	27	15,000,000	28	26,500,000	28	25,000,000	29	7,500,000	29	7,500,000	DISPORABUDPAR
		Gelanggang/balai remaja(selain milik swasta)	0	0		0		0		0		0		1		DISPORABUDPAR
		Lapangan olah raga	231	231		235		240		245		250		250		DISPORABUDPAR
<b>MISI 6</b>																
<b>1.19 Urusan wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri</b>																
1	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Frekuensi kegiatan Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI)	2	2	229,923,000	2	262,671,000	2	280,856,720	2	359,763,854	2	303,759,131	2	303,759,131	Badan Kesbangpolinmas
2	Program pendidikan politik masyarakat	Frekwensi dialog antara warga masyarakat dengan Forum Pimpinan Daerah	2	0	43,712,000	1	48,084,000	2	175,250,000	2	306,250,000	4	212,500,000	4	212,500,000	Badan Kesbangpolinmas
		Persentase partisipasi masyarakat dalam pembinaan politik daerah	73,25%	0		0		73.25 %		74.67 %		74.00 %		75%		Badan Kesbangpolinmas
3	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Jumlah ormas yang mengikuti kegiatan wawasan kebangsaan di tingkat Provinsi dan Nasional	8	10	139,058,000	12	286,261,000	13	306,861,000	14	340,391,000	15	358,757,000	15	358,757,000	Badan Kesbangpolinmas

Kode	Bidang urusan/ Pogram	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja Kondisi Awal (2009/2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD		
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tar get	Rp			
				Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		
		Frekuensi koordinasi FKUB	2	2		3		3		3		3		3			Badan Kesbangpolinmas	
4	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Angka kriminalitas yang tertangani	12,47 %	12.60 %	806,950,000	13 %	941,345,000	13,5%	1,170,673,440	14 %	1,403,162,379	14,5%	806,950,000	14%	806,950,000		Badan Kesbangpolinmas	
		Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	4,08	4		4		5		5		6		7,00			Satpol PP	
		Jumlah Linmas per 10.000 penduduk	78.54	80.77		81.54		82.69		83.85		84.62		84.62				Badan Kesbangpolinmas
		Petugas Linmas di Kota	775	775		775		800		800		800						Badan Kesbangpolinmas
		Jumlah Pos Kamling per jumlah Kelurahan	13	13		13		13		13		13			13			Badan Kesbangpolinmas
		Tingkat penyelesaian pelanggaran ketertarikan dan ketertiban masyarakat	20%	25%		30%		35%		40%		50%			50%			Badan Kesbangpolinmas
		<i>jumlah aparat yg mendapatkan diklat linmas/kamtibmas/SAR/Satpol PP</i>	30	30		40		80		100		100			45			Badan Kesbangpolinmas
			53	51		30		60		60		60			90			Satpol PP
			2	7		9		11		13			15			DPU		
		Penegakan Perda dan Peraturan KDH yang berkaitan dengan ketertarikan umum dan ketertarikan masyarakat	5	6		7		8		9		10		10				
5	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Tersedianya Satlinmas inti penanggulangan bencana	31	31	0	62	42,500,000	62	52,500,000	62	61,000,000	62	65,000,000	62	65,000,000		Badan Kesbangpolinmas	
		Kelengkapan sarana/prasarana penanggulangan bencana di setiap SKPD/perusahaan/perkampungan	50%	50%		55%		60%		65%		70%		75%			Badan Kesbangpolinmas	

Kode	Bidang urusan/ Pogram	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja Kondisi Awal (2009/2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tar get	Rp	
				Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
1.13	<b>Wajib sosial</b>															
	Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat	Persentase penurunan penyakit masyarakat	20	25	83,897,000	25	128,067,000	25	131,080,000	30	147,080,000	30	151,580,000	30	151,580,000	Disnakertransos
1.04	<b>Urusan wajib perumahan</b>															
	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kota	1 mobil: 26000	1 mobil: 26000		2 mobil: 26000		3 mobil: 26000		4 mobil: 26000		1 mobil: 20000		1 mobil: 20000		DPU
		Tingkat waktu tanggap daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		DPU